

**ANALISIS KERJASAMA EKONOMI ANTARA BUMDes, POKDARWIS,
DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI
WISATA DI DESA KALEKE KAB. SIGI**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Syariah (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh:

ANGGUN CALCIO
21.5.12.0013

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu,



2837FAMX294068900

Anggun Calcio

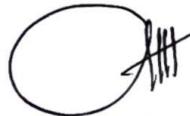
NIM. 21.5.12.0013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Kerjasama Ekonomi Antara Bumdes, Pokdarwis, Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi” oleh mahasiswa atas nama Anggun Calcio NIM: 215120013. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 2 Maret 2025 M
2 Ramadhan 1446 H

Pembimbing I



Nurfitriani, S.E.I., M.E
NIP. 199312072019032012

Pembimbing II

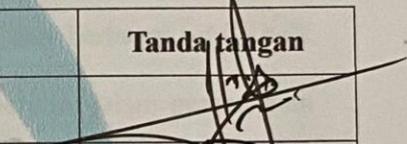
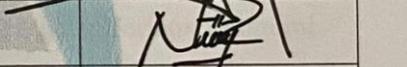
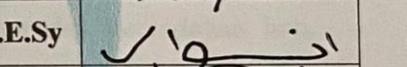
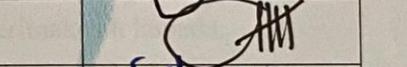
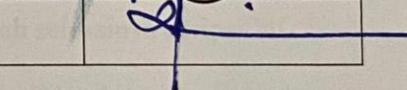


Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si
NIP. 199103262023211018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Anggun Calcio, NIM. 215120013 dengan judul “Analisis Kerjasama Ekonomi Antara BUMDes, Pokdarwis Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi” yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 4 Juni 2025 M yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1446 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

| Jabatan | Nama | Tanda tangan |
|------------------|--------------------------------------|--|
| Ketua Sidang | Dewi Salmita, S.Ak., M.Ak |  |
| Penguji Utama I | Nur Wanita, S.Ag., M.Ag |  |
| Penguji Utama II | Moh. Anwar Zainuddin, S.E.I., M.E.Sy |  |
| Pembimbing I | Nurfitriani, S.E.I., M.E |  |
| Pembimbing II | Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si |  |

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP. 19650612 199203 1 004

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Nursyamsu, S.H.I., M.S.I
NIP. 19860507 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt, karena berkat nikmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita, Nabi yang telah berhasil meletakkan nilai-nilai dasar kemanusiaan di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad Saw.

Untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, tentunya banyak mendapatkan doa dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E). Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Allah swt, atas rahmat kesehatan dan kesyukuran telah selesainya skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Abdul Halik dan Ibu Dian Lestari yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, serta membiayai sehingga penulis bisa melangkah sejauh ini. Kepada adikku yang cantik Kanesyia Princess Nofriza, kepada keluarga besar penulis, yang sudah mendoakan dan memberikan dukungan.
3. Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Dr. Hamka S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan M.Ag selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan,

Dr. H. Faisal Attamimi S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, dan Dr. H. Zaenuri M.Hum selaku KARO AUPK Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

4. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E, selaku Wakil Dekan I FEBI Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I, selaku Wakil Dekan II FEBI Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Malkan, M.Ag, selaku Wakil Dekan III FEBI Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, dan Drs. Ismail Hi. Ibrahim Maku, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
5. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I, selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah dan Dewi Salmita, S.Ak., M.Ak, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
6. Noval, M.M, selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan banyak arahan kepada penulis.
7. Nurfitriani, S.E.I.,M.E., selaku Pembimbing I dan Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si, selaku Pembimbing II penulis yang sangat banyak memberikan arahan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
8. Seluruh Dosen UIN Datokarama Palu, terkhusus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik penulis dengan berbagai disiplin keilmuannya, semoga amal baik mereka membawa manfaat bagi peningkatan profesionalisme keilmuan.
9. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.

10. Rifai, S.E., M.M, selaku Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik.
11. Muhammad Taufan S.T, selaku Kepala Desa Kaleke yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat Desa Kaleke, yang sudah bersedia menjadi informan selama peneliti melakukan penelitian.
12. Kepada Tantri Dian Sofrani dan Safia Shallu Fatnah yang selalu menjadi teman belajar, diskusi dan mendengar keluh kesah penulis.
13. Kepada Fu'adatul Afiah, Mahdiyyah, Fitriani, Farda Melati Putri, Munipa dan Nur Kholis terima kasih sudah menjadi teman yang baik selama kuliah, selalu mendengar keluh kesah penulis dan selalu mendukung di setiap hal yang penulis lakukan.
14. Seluruh teman-teman Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2021, terkhusus teman-teman ESY 1 yang sudah menjadi teman yang baik dan saling mendukung selama kuliah. Serta teman-teman KKN Kel. Poboya 2024.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan, pengalaman dan pengetahuan dari penulis. Sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan para pembaca dan berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dibidang Ekonomi Syariah Aaamiin Yaa Rabbal 'Alaamiin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palu, 2 Maret 2025 M

Penulis

ANGGUN CALCIO
NIM. 21.5.12.0013

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| D. Penegasan Istilah | 6 |
| E. Garis-Garis Besar Isi | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |
| B. Kajian Teori | 11 |
| 1. Kerjasama | 11 |
| 2. Penjualan Air Bersih Menurut Perspektif Ekonomi Islam... | 20 |
| 3. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) | 22 |
| 4. Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)..... | 23 |
| 5. Pengembangan Destinasi Wisata | 24 |
| C. Kerangka Pemikiran | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 29 |
| B. Lokasi Penelitian | 30 |
| C. Kehadiran Peneliti | 30 |
| D. Sumber Data | 30 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| | F. Teknik Analisis Data..... | 32 |
| | G. Pengecekan Keabsahan Data..... | 34 |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 36 |
| | B. Bentuk Program Kerjasama Antara BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi..... | 47 |
| | C. Kelebihan dan kekurangan Dalam Program Kerjasama Antara BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi..... | 90 |
| | D. Bentuk Kerjasama Ekonomi Antara BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Desa Kaleke Kab. Sigi Menurut Perspektif Ekonomi Islam | 93 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan..... | 99 |
| | B. Saran..... | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 28

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------|-----------|
| Tabel 1.2 | 4 |
| Tabel 2.1 | 9 |
| Tabel 4.1 | 41 |
| Tabel 4.2 | 44 |
| Tabel 4.3 | 46 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Lembar Pengajuan Judul

Lampiran 3 : Surat Keputusan penetapan Pembimbing

Lampiran 4 : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 6 : Dokumentasi

Lampiran 7 : Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Anggun Calcio
NIM : 21.5.12.0013
Judul Skripsi : “Analisis Kerjasama Ekonomi Antara BUMDes, Pokdarwis Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke”

Indonesia memiliki potensi wisata yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian, termasuk Sulawesi Tengah yang memiliki 118 desa wisata. Salah satunya ada di Kabupaten Sigi, yaitu desa wisata kampung merah putih atau dikenal sebagai Desa Kaleke yang mengembangkan potensi wisata permandian Bionga dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam. Pengelolaan destinasi wisata ini melibatkan kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke dapat mendukung keberlanjutan pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun, metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian bahwa bentuk program kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke menunjukkan kerjasama multi-pihak yang menggabungkan kekuatan finansial, keterampilan operasional dan kontribusi lokal. BUMDes menyediakan dana, Pokdarwis mengelola operasional dan masyarakat mendukung dengan fasilitas serta aktivitas ekonomi untuk pembangunan berbasis potensi lokal. Kerjasama ini saling melengkapi berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, serta meningkatkan ekonomi langsung bagi masyarakat. Namun ada beberapa kendala seperti ketergantungan pendanaan dengan BUMDes, keterbatasan sumber daya, tantangan dalam pembebasan lahan, pengelolaan yang belum optimal dan kurangnya fasilitas ibadah. Kerjasama ini mencerminkan prinsip ekonomi islam dengan keadilan dalam pembagian manfaat, transparansi melalui negosiasi terbuka, dan tanggungjawab melalui pembagian peran yang jelas.

Implikasi dari penelitian ini adalah menekankan pentingnya pengembangan kebijakan lokal dalam mendukung kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat seperti alokasi dana, regulasi pengelolaan dana, dan penyediaan fasilitas umum. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan manajemen pariwisata, serta memperluas pendanaan agar tidak bergantung pada BUMDes, peningkatan infrastruktur dan pendekatan berbasis ekonomi islam dapat menjadi model bagi desa lain dalam mengembangkan ekonomi berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya, alam, dan peninggalan sejarahnya yang menjadikan sebagai destinasi wisata dengan potensi luar biasa. Diberbagai daerah sektor pariwisata berperan sebagai pendorong utama ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kesejahteraan masyarakat. Di tingkat nasional, pariwisata memiliki peran penting mendukung perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang terus berkembang serta berfungsi sebagai faktor yang mempercepat pembangunan ekonomi daerah.¹

Seiring dengan potensi besar sektor pariwisata di Indonesia, Sulawesi Tengah juga mengalami perkembangan yang signifikan dengan melakukan pengelolaan sektor pariwisata yang berpotensi menjadi sumber pendapatan fiskal utama yang dapat mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Sulawesi Tengah saat ini telah berupaya agar objek wisata megalith di Kabupten Poso diakui sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional. Serta terus berupaya menggali potensi sumber daya alam, budaya dan sejarah untuk menjadi landasan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan, sehingga menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara. Untuk mendukung promosi sektor pariwisata Sulawesi Tengah pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan

¹ Muh Ryan Rahmatul Hidayat, "Potensi Pariwisata Sebagai Lokomotif Perekonomian Di Kabupaten Demak," *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* 11, no. 1 (2024): 72.

Informatika, termasuk memanfaatkan media *Government Public Relation Television* (GPRTV).²

Selain pengembangan objek wisata unggulan, sektor pariwisata berbasis masyarakat juga berkembang pesat di Sulawesi Tengah. Hal ini terlihat dengan adanya 118 desa wisata di Sulawesi Tengah yang sedang dalam tahap pengembangan. Dengan adanya desa wisata diharapkan dapat memperkuat pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat, yang memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan kekayaan alam serta budaya setempat.³

Kabupaten Sigi sebagai salah satu daerah yang melakukan pengembangan desa wisata untuk memperkuat sektor pariwisata berbasis masyarakat di Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Sigi telah menjalankan program pengembangan pariwisata desa yang melibatkan 11 desa, yang bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi wisata alam dan budaya.⁴

Salah satu desa wisata yang ada di kabupaten Sigi adalah desa wisata kampung merah putih atau dikenal sebagai desa Kaleke kecamatan Dolo Barat, yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Desa Kaleke memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis sumber daya alam. Adapun potensi wisata desa ini merupakan permandian Bionga yang didukung oleh kekayaan alam, nilai sejarah dan kearifan lokal. Adapun Kegiatan

² Job Runtukahu, "Sektor Pariwisata Sulteng Penunjang Utama Pembangunan," *Radio Republik Indonesia (RRI)*. 18 Maret 2023. <https://www.rri.co.id/wisata/191531/sektor-pariwisata-sulteng-penunjang-utama-pembangunan>. (5 Januari 2025).

³ Jadesta, "*Sulawesi Tengah*". <https://sulteng.jadesta.com/>. (5 Januari 2025).

⁴ Muhammad Hajiji, "Pemkab Sigi Pacu Pengembangan Pariwisata Tingkatkan Ekonomi Rakyat," *antaranews*. 6 Juli 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3622365/pemkab-sigi-pacu-pengembangan-pariwisata-tingkatkan-ekonomi-rakyat>. (5 Januari 2025)

seperti *Festival Musik Bionga* dan *Festival Kampung Merah Putih* menunjukkan komitmen desa dalam mengembangkan pariwisata.⁵ Selain itu, masyarakat Desa Kaleke masih mempertahankan kearifan lokal seperti *Nokololio* dan *Novunja*, serta mengembangkan seni dan kerajinan tradisional seperti pembuatan parang dan alat musik tradisional Kaili.⁶ Namun, dengan meningkatnya popularitas permandian ini, muncul kekhawatiran terkait pemanfaatan air yang tidak terkendali untuk tujuan komersial yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

Adapun untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan memastikan pemanfaatannya yang optimal bagi masyarakat dan sektor pariwisata, Pemerintah Desa Kaleke mengeluarkan peraturan desa yang menunjuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pengelola resmi sarana air bersih. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mendukung pengembangan pariwisata desa yang ramah lingkungan.

Pengelolaan wisata Mata Air Bionga di Desa Kaleke melibatkan kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Pokdarwis, dan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan destinasi wisata. Bumdes bertanggung jawab dalam hal pengadaan dana untuk pembangunan infrastruktur wisata, mengelola keuangan secara transparan, serta merencanakan investasi jangka panjang untuk mendukung pariwisata. Pokdarwis mengelola tempat wisata, menyambut wisatawan, menjaga kebersihan, dan mengedukasi

⁵ Made Adhitya Saputra dan Irwansyah Kamindang, "Kapasitas Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Desa Wisata Kampung Merah Putih Di Desa Kaleke, Kabupaten Sigi," *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 1, no. 9 (2024): 529.

⁶ Jadesta, "*Desa Wisata Kampung Merah Putih Desa Kaleke Kec. Dolo Barat Kab. Sigi*" https://sulteng.jadesta.com/desa/kampung_merah_putih. (5 Januari 2025).

masyarakat. Masyarakat berperan aktif dalam melestarikan alam dan budaya lokal dan turut serta dalam kegiatan ekonomi berbasis pariwisata, seperti kerajinan tangan dan kuliner.

Kolaborasi yang baik antara Bumdes, Pokdarwis, dan masyarakat memastikan pengelolaan wisata yang efisien, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi seluruh pihak, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Keberhasilan pengelolaan ini terlihat dengan meningkatnya jumlah pengunjung setiap tahunnya, seperti pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Data Pengunjung

| No | Jumlah Pengunjung | Tahun |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 653 | 2022 |
| 2 | 720 | 2023 |
| 3 | 834 | 2024 |

Sumber: wawancara ketua pokdarwis, 2025.

Tabel 1.2 menggambarkan jumlah pengunjung Permandian Bionga yang dihitung berdasarkan data penjualan air bersih yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Kaleke. Peningkatan jumlah pengunjung ini mencerminkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan, didukung dengan peningkatan promosi, perbaikan fasilitas, serta daya tarik alam dan budaya Desa Kaleke. Selain sebagai sumber daya komersial, data penjualan air bersih juga berfungsi sebagai indikator perkembangan kegiatan wisata yang memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang optimal, permandian

bionga memiliki potensi untuk berkembang menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kerjasama ekonomi antara Bumdes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke dapat mendukung keberlanjutan pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini ialah:

1. Bagaimana bentuk Program Kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan Masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke Kab. Sigi?
2. Apa kelebihan dan kekurangan yang dihadapi dalam Program Kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan Masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke Kab. Sigi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan yang didasarkan dengan rumusan masalah.

Penulis memiliki beberapa tujuan penelitian, yakni:

- a. Untuk mengetahui bentuk Program Kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan Masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke Kab. Sigi.

- b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dihadapi dalam Program Kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan Masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke Kab. Sigi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, antara lain:

- a. Bagi Desa Kaleke, memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat telah berjalan efektif dalam pengembangan destinasi wisata. Dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan yang lebih mendukung pengembangan pariwisata desa secara berkelanjutan.
- b. Bagi BUMDes, Pokdarwis, dan Masyarakat, Memberikan masukan untuk meningkatkan kapasitas BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam mengelola kerjasama ekonomi dan mengembangkan destinasi wisata.
- c. Bagi Akademisi, menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, khususnya terkait dengan peran BUMDes dan Pokdarwis. Dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami isu serupa di daerah lain.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. BUMDes

BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan oleh desa untuk mengelola berbagai jenis usaha, mulai dari investasi hingga pelayanan, demi kesejahteraan warga.

2. Pokdarwis

Pokdarwis merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata di desa.

3. Pengembangan Destinasi Wisata

Pengembangan destinasi wisata adalah upaya berkelanjutan untuk membuat suatu tempat wisata semakin menarik dan sesuai dengan kebutuhan pengunjung.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada di dalam komposisi skripsi ini. Rangkaian penulisan skripsi ini isinya penulis paparkan secara sistematis ke dalam tiga bab berturut-turut sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab kedua, yang berupa kajian pustaka dan menguraikan serta menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab ketiga, yaitu mengenai metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, bab ini merupakan bab hasil dan pembahasan yang berisi hasil penelitian dari sumber data. Analisis dan hasil penelitian menjadi lebih mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan mengenai objek penelitian, analisis penelitian, serta analisis data dan pembahasan.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan. Saran yang diajukan terkait dengan penelitian dan anjuran yang diharapkan dapat berguna untuk pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan untuk meneliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang dijadikan sebagai referensi perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang berkaitan dengan judul peneliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Judul Penelitian | Tahun Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|------------------|--|---|
| 1 | Made Adhitya Saputra dan Irwansyah Kamindang. “Kapasitas Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Desa Wisata Kampung Merah Putih Di Desa Kaleke, Kabupaten Sigi” ⁷ | 2024 | <ul style="list-style-type: none"> • Metode kualitatif deskriptif • Objek penelitian yang Melibatkan Pokdrawis • Tempat penelitian di Desa Kaleke | <ul style="list-style-type: none"> • Berfokus pada kelembagaan pokdarwis • Subjek penelitian Kapasitas pokdarwis menjadi penggerak pengembangan desa wisata |

⁷ Made Adhitya Saputra dan Irwansyah Kamindang, “Kapasitas Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Desa Wisata Kampung Merah Putih Di Desa Kaleke, Kabupaten Sigi,” *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 1, no. 9 (2024).

| | | | | |
|---|---|------|---|---|
| 2 | Mayolita Panjaitan, Dkk. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Desa Kuta Jungk Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara” ⁸ | 2023 | <ul style="list-style-type: none"> • Metode kualitatif deskriptif • Subjek penelitian yang berfokus pada Upaya pengembangan desa wisata • Melibatkan Masyarakat dan pokdarwis. | <ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian yang lebih luas pada pemberdayaan Masyarakat secara keseluruhan dalam pengembangan desa wisata • Lokasi penelitian di Desa Kuta Jungk |
| 3 | Dyas Syahlia Izmi dan Ananta Prathama. “Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis BUMDes” ⁹ | 2023 | <ul style="list-style-type: none"> • Metode kualitatif deskriptif • Subjek penelitian berfokus pada pengembangan destinasi wisata • Keterlibatan BUMDes | Penelitian ini tentang peran menyeluruh BUMDes menjadi penggerak dalam pengembangan wisata |

⁸ Mayolita Panjaitan, R. Hamdani Harahap dan Hadriana Marhaeni Munthe, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Desa Kuta Jungk Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara,” *PERSPEKTIF* 12, no. 1 (2023).

⁹ Dyas Syahlia Izmi dan Ananta Prathama, “Pengembangan Desa Wisata Berbasis BUMDes,” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no.3 (2023).

| | | | | |
|---|---|------|--|---|
| 4 | Aby Setiawan. “Peran POKDARWIS dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Biru Kersik Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara” ¹⁰ | 2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Metode kualitatif deskriptif • Subjek penelitian yang berfokus pada pengembangan destinasi wisata • Keterlibatan Pokdarwis | Fokus utama dalam penelitian ini ialah pada peran Pokdarwis |
|---|---|------|--|---|

B. Kajian Teori

1. Kerjasama

a. Teori Kolaborasi (Collaboration Theory)

1) Pengertian *collaborative governance*

Collaborative governance adalah kerjasama yang melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah atau isu publik. Kerjasama ini bertujuan untuk menemukan solusi yang efektif dengan melibatkan partisipasi langsung atau kontribusi tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga menciptakan hasil yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan pariwisata, peran pihak non-pemerintah dapat membantu memperkuat kebijakan pemerintah dengan menyatukan sumber daya, ide, dan keahlian untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan relevan.

¹⁰ Aby Setiawan, “Peran POKDARWIS dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Biru Kersik Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara,” *Jurnal Administrasi Bisnis FISIPOL UNMUL* 10, no. 3 (2022).

Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kebijakan, tetapi juga memperluas dampak positifnya pada masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.¹¹

2) Indikator *collaborative governance*

Indikator *collaborative governance* merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan memantau keberhasilan kolaborasi berbagai pihak, dalam mencapai tujuan bersama. Indikator ini membantu mengidentifikasi efektivitas dan efisiensi kolaborasi, serta memberikan informasi untuk perbaikan di masa depan. Adapun indikator untuk keberhasilan kolaborasi dapat diukur melalui beberapa, yaitu:

a) *Kondisi Awal*

Kondisi awal sangat mempengaruhi keberhasilan kolaborasi, karena ada banyak faktor dapat berfungsi sebagai pendukung atau penghambat dalam membangun kerjasama antara pemangku kepentingan dan lembaga/organisasi.

Adapun Indikator-indikatornya, yaitu:

- (1) Pengaruh atau kekuatan, mengukur sejauh mana semua pihak secara merata agar memiliki posisi yang seimbang dalam kolaborasi.
- (2) Sumber daya, mengukur sejauh mana sumber daya yang dimiliki semua pihak dapat mendukung kolaborasi.
- (3) Pengetahuan, mengukur sejauh mana setiap pihak memiliki informasi dan keahlian yang diperlukan untuk mendukung kolaborasi.

¹¹ Erica Indah Maulia dan Budi Setiyono, "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata," *Journal of Politic and Government Studies* 13, No. 1 (2024): 4.

b) Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan berkaitan dengan struktur dan mekanisme yang mendasari pelaksanaan kolaborasi. Aspek ini sangat penting karena memberikan prosedural yang sah untuk proses kolaborasi yang dijalankan. Adapun indikator-indikatornya yaitu:

- (1) Partisipasi pihak-pihak terkait, mengukur sejauh mana semua pihak terlibat dalam setiap proses kolaborasi.
- (2) Pembentukan forum, mengukur ketersediaan tempat atau ruang interaksi dan diskusi antar pihak.
- (3) Kejelasan prosedur pelaksanaan, mengukur seberapa jelas aturan dan cara-cara yang ditetapkan dalam menjalankan kolaborasi.
- (4) Transparansi proses, mengukur sejauh mana seluruh proses kolaborasi dilakukan secara terbuka sehingga semua pihak dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang diambil.

c) Kepemimpinan

Proses kolaborasi sering kali dipengaruhi oleh konflik dan ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan, meskipun dorongan untuk berpartisipasi tetap kuat. Adapun indikator-indikatornya yaitu:

- (1) Kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pemimpin, Seberapa baik para pihak merasakan peran pemimpin dalam proses kolaborasi.
- (2) Kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik, Seberapa baik pemimpin menyelesaikan perbedaan atau ketegangan yang muncul.

- (3) Jumlah kesepakatan yang tercapai, Indikator ini dapat menunjukkan keberhasilan pemimpin dalam memfasilitasi keputusan yang diterima bersama.

d) Proses Kolaboratif

Indikator-indikator dalam proses kolaboratif yaitu:

- (1) Diskusi antar pihak, mengukur seberapa sering dan efektif komunikasi dan pertukaran pendapat terjadi di antara semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi.
- (2) Membangun kepercayaan, mengukur bagaimana pihak-pihak yang terlibat saling percaya satu sama lain, sehingga mereka bisa berbagi informasi dan bekerja sama tanpa rasa curiga atau takut.
- (3) Komitmen, mengukur sejauh mana setiap pihak bertekad untuk mencapai tujuan kolaborasi dan berkontribusi secara konsisten selama proses berjalan.
- (4) Pemahaman bersama, mengukur sejauh mana semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, harapan, serta tantangan dalam kolaborasi.
- (5) Hasil menengah, mengukur sejauh mana kolaborasi sudah menghasilkan pencapaian atau kemajuan, meskipun itu hanya hasil sementara atau tahap awal.¹²

¹² Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono dan Abd. Rachim, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press, 2020), 76-79.

b. Pengertian Kerjasama Ekonomi

Kerjasama merupakan hubungan sosial yang didasari oleh rasa saling percaya dan menghargai dengan mencapai tujuan bersama. Adapun kerjasama dalam organisasi merupakan upaya untuk mencapai tujuan organisasi dan proses untuk menyelesaikan tugas bersama.¹³

Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Adapun ekonomi berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui optimalisasi sumber daya efektif dan efisien.¹⁴

Berdasarkan dari pengertian di atas bahwa Kerjasama ekonomi merupakan suatu hubungan sosial yang melibatkan dua pihak atau lebih, dengan mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif.

c. Model Kerjasama Stakeholder Dalam Pengembangan Destinasi Wisata

Stakeholder merupakan suatu individu yang memiliki kepentingan atau perhatian terhadap permasalahan tertentu. *Stakeholder* juga merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu, maka jika berbicara mengenai *stakeholder* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak.¹⁵

¹³ Maya Puspitasari, "Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2," *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2022): 213-214..

¹⁴ Megi Tindangen, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020): 80.

¹⁵ R. Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (Boston: Pitman, 1984), 37.

Model *Stakeholder* berperan penting dalam pengembangan pariwisata untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan melibatkan masyarakat terkait pengelolaan dan perencanaan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor utama dalam sektor ini karena adanya keterbatasan dalam aspek keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi. Oleh karena itu, kerjasama dengan berbagai pihak sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata bergantung pada peran dan dukungan dari *stakeholder*, sehingga harus memiliki tujuan yang sama dan berkomitmen untuk perencanaan pembangunan pariwisata. Adapun para *stakeholder* harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan tahapan lainnya dalam pengembangan pariwisata dan memastikan keterlibatan mereka seimbang.¹⁶

d. Kerjasama Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Al-Qur'an mengajarkan pentingnya saling membantu dalam melakukan perbuatan baik. Konsep ini juga terlihat dalam dunia bisnis, di mana kerjasama yang saling menguntungkan menjadi bagian dari prinsip tolong-menolong. Setiap pihak yang terlibat diharapkan dapat memperoleh keuntungan, sambil memberikan manfaat dan keuntungan kepada pihak lainnya.¹⁷ Seperti pada prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam sebagai berikut:

¹⁶ Abdul Sabaruddin, Maulid, Taslim Fait, dan Maharani, "Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Alam Kea-Kea Mangolo di Kabupaten Kolaka," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2023): 173-174.

¹⁷ Abdullah Arif Mukhlas, "Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 3.

1) Prinsip keadilan

Dalam Al-Qur'an, keadilan memiliki pengertian yang berbeda-beda baik kata atau istilah yang saling bersangkutan paut. Kata yang digunakan untuk memperlihatkan sisi keadilan bukan hanya kata 'adl tetapi kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan dalam Al-Qur'an sebagai pengertian keadilan.¹⁸

Keadilan merupakan hal penting dalam ekonomi Islam, yang menekankan pada keseimbangan antara spiritual dan material dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan keadilan adalah prinsip yang harus di terapkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan harmonis.¹⁹ Adapun firman Allah swt tentang keadilan yaitu Q.S An-Nahl / 16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat

Tafsir dari surah tersebut bahwa, Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik dari lainnya. Allah memerintahkan mereka untuk

¹⁸ Zulkarnain Lubis, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Spektra* 3, no. 2 (2021): 5.

¹⁹ Sufi Indrayani dan Mawardi, "Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah (Q.S Al-Baqarah: 275-281)," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): 73.

memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Allah melarang mereka berbuat dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan akal sehat. Allah melarang mereka menyakiti orang lain. Dengan perintah dan larangan itu, Allah bermaksud membimbing kalian menuju kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, agar kalian selalu ingat karunia-Nya dan menaati firman-firman-Nya.²⁰

2) Prinsip transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang berarti suatu benda yang sifatnya tembus pandang sehingga obyek yang ada di balik benda memiliki sifat transparan akan terlihat jelas dan jernih.²¹ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi merupakan keterbukaan untuk mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan.²²

Transparansi merupakan salah satu syarat kerjasama, dengan adanya transparansi hal itu akan mengikis persengketaan dan kecurigaan sehingga kerjasama dapat berjalan jangka panjang dan saling menguntungkan. Islam menjunjung tinggi kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk pada kerjasama bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai ekonomi Islam seperti

²⁰ TafsirQ, "Tafsir Quraish Shihab", <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90#tafsir-quraish-shihab>. (7 Juni 2025).

²¹ Dian Purna Anugerah Yuniarti, "Implementasi Prinsip Transparansi Melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 Pada Industri Ekstraktif", *Yuridika* 25, no. 1 (2010): 29.

²² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 260.

keadilan dan mencegah kezaliman.²³ Prinsip transparansi dalam Islam berdasarkan firman Allah pada Q.S Al-Anfal / 8: 58.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Terjemahnya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.²⁴

Tafsir dari surah tersebut ialah apabila engkau merasakan tanda-tanda pengkhianatan suatu kaum terhadap perjanjian yang engkau buat antara engkau dengan mereka, maka putuskanlah usaha-usaha pengkhianatan itu dengan memberikan ultimatum baru bahwa engkau telah membatalkan perjanjian itu, sehingga mereka mengetahui sikapmu dan tidak dapat mengkhianatimu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat dan tidak menginginkan ada pengkhianat di antara kalian.²⁵

3) Prinsip tanggungjawab

Tanggungjawab adalah suatu kewajiban untuk menyelesaikan atau melakukan tugas yang harus di penuhi, memiliki konsekuensi kegagalan, dan mengerjakan tugas sebaik mungkin. Bila terjadi kesalahan pada tugas yang di emban, tidak menyalahkan orang lain serta fokus untuk memberikan hasil yang maksimal dengan menekankan sikap positif. Dan tanggungjawab juga merupakan

²³ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 242.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," Situs Resmi KEMENAG. <https://quranindonesia.kemenag.go.id>. (7 Juni 2025).

²⁵ TafsirQ, "Tafsir Quraish Shihab", <https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-58>. (7 Juni 2025).

kesadaran seseorang untuk menyelesaikan tugasnya dalam hal apapun.²⁶

Tanggungjawab dalam ekonomi syariah memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Tanggungjawab ini mencakup kewajiban menjaga kesejahteraan, bermanfaat dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.²⁷ Berdasarkan firman Allah pada Q.S Al-Muddassir / 29: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya: Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.²⁸

Dalam ayat di atas Allah menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah. Baik yang muslim maupun yang kafir, yang ingkar atau pun yang taat, semuanya tergantung kepada Allah. Tiap jiwa terikat dengan amal yang dikerjakan sampai hari kiamat, kecuali golongan kanan. Artinya mereka dapat melepaskan keterikatan mereka di sisi Allah dengan amal-amal baik yang mereka kerjakan, sebagaimana halnya seorang dapat melepaskan diri dari status gadai karena telah membayarkan kewajibannya.²⁹

2. Penjualan Air Bersih Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pandangan ekonomi Islam, menurut para ulama penjualan air bersih tidak di perbolehkan selama memang masih di tempatnya masing-masing.

²⁶ Miramur Permata Sari, Fitriah Hayati, dan Fitriani, "Analisis Upaya Guru Dalam Menanamkan Karakter Tanggungjawab Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Khairani Aceh Besar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2022): 3-4.

²⁷ Maulena, Teuku Zulkarnain, dan Mariana, "Transformasi Bisnis Dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan Dan Tanggungjawab Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 7, no. 2 (2024): 3.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," Situs Resmi KEMENAG. <https://quranindonesia.kemenag.go.id>. (7 Juni 2025).

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 431.

Maksudnya, misalnya air sungai airnya masih berada di sungai tidak boleh dijual. Termasuk juga air laut yang masih di laut, atau air yang dari mata air yang masih di sumbernya. Berdasarkan hadis Rasulullah saw, “Seluruh kaum muslimin bersekutu atas tiga hal: air, rumput gembalaan, dan api. Semuanya haram untuk dihargai (dijual) (H. R. Abud Dawud dan Ibnu Majah).”

Jika menjual air dari sumbernya diharamkan, maka ada kondisi lain yang membolehkan memperdagangkan air. Menurut Sayyid Sabid dari kitab Fiqih Sunahnya, apabila ada seseorang yang mengambil/mengumpulkan/menampung air hingga jadi miliknya, maka ia boleh menjual air tersebut kepada orang lain.³⁰ Ayat Al-Qur’an yang membahas penjualan air bersih yaitu sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.³¹

Tarfsirnya, Allah menyatakan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu di bumi untuk manusia. Ini menunjukkan bahwa semua ciptaan di bumi, baik yang hidup maupun tidak hidup, ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Ini mencakup hewan, tumbuhan, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. Allah menyatakan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu di bumi untuk manusia. Ini menunjukkan

³⁰ Eka Purwitasari, “Hukum Menjual Air,” *Rumah Zakat*, 27 Juli 2023, <https://www.rumahzakat.org/hukum-menjual-air>. (11 Juni 2025).

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya,” Situs Resmi KEMENAG. <https://quranindonesia.kemenag.go.id>. (11 Juni 2025).

bahwa semua ciptaan di bumi, baik yang hidup maupun tidak hidup, ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Ini mencakup hewan, tumbuhan, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.³²

3. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum bukan badan usaha.³³ Selanjutnya, dalam Peraturan Desa Kaleke nomor 07 tahun 2023 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa kaleke untuk memaksimalkan potensi dan mensejahterakan masyarakat.³⁴

BUMDes memiliki peran strategis dalam perekonomian desa, dengan fungsi utama sebagai lembaga sosial yang menyediakan layanan sosial dan lembaga komersial yang memasarkan sumber daya lokal ke pasar. Peran BUMDes diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang memastikan hasil BUMDes digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa dengan prinsip "dari desa, oleh desa, dan untuk desa," BUMDes berfungsi sebagai badan usaha yang profesional, berlandaskan potensi desa, dan

³² Abdul Muid, Ahmad Syifa'ul Fatoni, Fadhilatun Nadifah dan Muhammad Rondi, "Makna Keberadaan Alam (Dunia) Tafsir Surah Al-Baqarah, 2: 29 Dan Al-Araf 7:54," Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam 13, no. 13 (2020): 9.

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 "*Tentang Badan Usaha Milik Desa*," Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.

³⁴ Peraturan Desa Kaleke Nomor 07 Tahun 2023 "*Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa SIGAMPA SEJAHTERA*".

memiliki status badan hukum sesuai ketentuan undang-undang.³⁵

4. Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata suatu daerah. Pokdarwis sebagai representasi masyarakat setempat berperan aktif dalam mengenali, mengembangkan, dan mengelola potensi wisata lokal. Pokdarwis berfungsi sebagai penggerak kesadaran wisata, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata, serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya sektor pariwisata bagi kesejahteraan. Dengan demikian, keberadaan Pokdarwis tidak hanya berkontribusi pada pengembangan destinasi wisata, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁶

Menurut peraturan perundang-undangan pariwisata, pokdarwis adalah kelompok warga yang bertugas untuk menjaga dan mengembangkan destinasi wisata.³⁷ Berdasarkan Peraturan Desa Kaleke tentang Sistem Pemeliharaan dan Pengelolaan Mata Air Desa Kaleke, Kelompok Sadar Wisata Desa Kaleke (Pokdarwis) yaitu tim kerja yang ditunjuk sebagai pelestarian dan pengelolaan terhadap pemanfaatan sarana air bersih. Pokdarwis berkewajiban membersihkan dan memelihara sumber-sumber mata air di Desa Kaleke.³⁸

³⁵ Kokok Putra Siswanda dan Meirinawati, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Mengembangkan Wisata Embung Di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan," *Publika* 9, no. 3 (2021): 324- 325.

³⁶ Aby Setiawan, "Peran POKDARWIS dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Biru Kersik Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara," *Jurnal Administrasi Bisnis FISIPOL UNMUL* 10, no. 3 (2022): 264.

³⁷ Made Adhitya Saputra dan Irwansyah Kamindang, "Kapasitas Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Desa Wisata Kampung Merah Putih Di Desa Kaleke, Kabupaten Sigi" *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 1, no. 9 (2024): 528.

³⁸ Peraturan Desa Kaleke tentang "Sistem Pemeliharaan dan Pengelolaan Mata Air Desa Kaleke" Tahun 2024.

Pokdarwis memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengelola pariwisata di daerahnya. Secara spesifik, Pokdarwis ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggotanya dalam mengelola destinasi wisata.
- b. Memotivasi masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata.
- c. Mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat.
- d. Mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata lokal.
- e. Memberikan masukan kepada pemerintah terkait pengembangan pariwisata.³⁹

Pembentukan Pokdarwis tidak hanya untuk mengurus tempat wisata, tetapi juga untuk mengajak masyarakat sekitar ikut terlibat aktif dalam mengembangkan dan menjaga tempat wisata tersebut. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi wisata.⁴⁰

5. Pengembangan Destinasi wisata

a. Pengertian pengembangan destinasi wisata

Pengembangan pariwisata merupakan upaya untuk membuat produk wisata menjadi lebih beragam dan berkualitas. Bertujuan untuk menciptakan

³⁹ Isna Salsabila dan Ardiana Yuli Pupitasari, "Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dalam Pengembangan Desa Wisata," *Jurnal Kajian Ruang* 3, no. 2 (2023): 246.

⁴⁰ Bramantyo Tri Asmoro dan Muh Mujib Da'awi, "Revitalisasi kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Desa Sukodono dalam pengelolaan obyek wisata coban pandawa," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 5, no. 1 (2020): 374.

pengalaman wisata yang lebih menarik dan memuaskan bagi wisatawan.⁴¹

Destinasi wisata merupakan suatu tempat yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung, dan suatu wilayah yang terorganisir dengan baik, memiliki berbagai fasilitas, dan saling terhubung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.⁴²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, Pengembangan destinasi wisata merupakan suatu hal yang bertujuan untuk menjadikan produk wisata menjadi lebih bervariasi dan berkualitas.

b. Komponen pengembangan pariwisata

Aspek 4A (*Attraction, Amenity, Accessibility, Ancilliary*) merupakan komponen dari kerangka pengembangan pariwisata, bisa diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Attraction* merupakan keunikan pada daya tarik wisata: Keindahan alam seperti gunung dan pantai, kekayaan budaya yaitu situs sejarah, hingga acara-acara buatan manusia seperti festival dan konferensi.
- 2) *Amenity* merupakan fasilitas penunjang: Setelah daya tarik utama suatu tempat wisata, fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan sangat penting untuk membuat wisatawan merasa nyaman dan betah selama berkunjung.

⁴¹ Shinta Nuria Salsabila, M Isa Anshori, Ahmad Kamil, dan Novia Jamilati, "Strategi Inovatif Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Industri Pariwisata di Bangkalan," *Jurnal Bintang Manajemen* 2, no.1 (2024): 183.

⁴² Heru Purboyo Hidayat Putro dan Alhilal Furqan, *Pengembangan Kota Berbasis Pariwisata Pusaka Berkelanjutan* (Bali: Intelektual Manifes Media, 2024), 11-12.

- 3) *Accessibility* merupakan akses yang dilalui menuju lokasi: Harus memberikan kemudahan kepada wisatawan yang berkunjung dengan memberikan petunjuk arah ataupun jalan yang bagus.
- 4) *Ancillary* yaitu bersangkutan dengan adanya keberadaan petugas dan kelembagaan organisasi: Keberadaan petugas dan organisasi pariwisata sangat penting untuk membantu mengembangkan dan mempromosikan suatu destinasi wisata.⁴³

c. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pariwisata

1) Demografi

Faktor demografi dapat memengaruhi perkembangan pariwisata karena pertumbuhan jumlah penduduk yang diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini, akan berdampak positif pada perkembangan pariwisata karena masyarakat yang sejahtera akan lebih aktif dalam berwisata dan memiliki daya beli yang lebih tinggi.

2) Sumber daya alam

Potensi sumber daya alam menjadi daya tarik utama, namun keberhasilan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Pariwisata yang berkelanjutan dan berfokus pada masyarakat akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak.

⁴³ Yunisti Pratiwi, "Identifikasi 4A (Attraction, Amenity, Accessibility dan Ancillary) dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Pantai Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung," *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* 3, no. 2 (2023): 61.

3) Ekonomi

Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Tidak hanya memberikan devisa, pariwisata juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan usaha-usaha kecil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Sosial budaya

Keberagaman budaya telah menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan produk wisata yang lebih beragam. Wisatawan modern mencari pengalaman yang unik dan autentik, sehingga mendorong destinasi wisata untuk menawarkan produk wisata yang berbasis budaya.

5) Teknologi

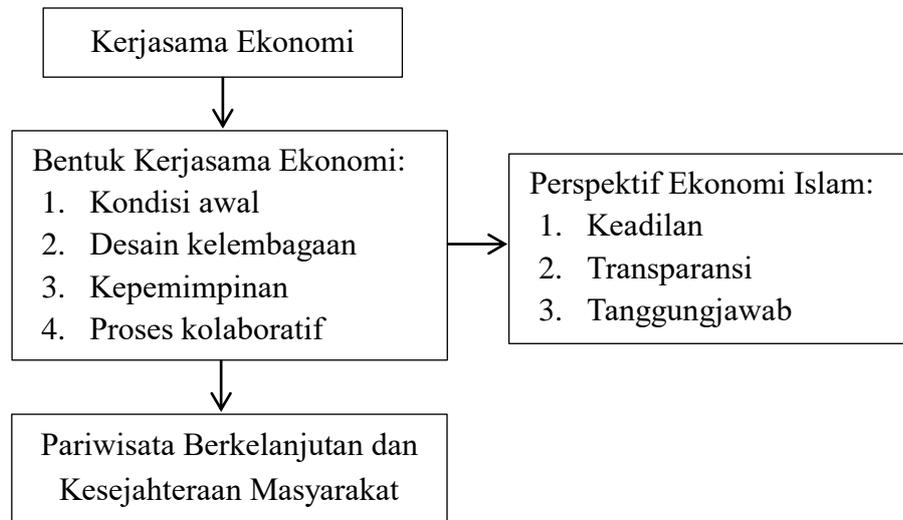
Perkembangan teknologi digital, terutama media sosial, telah mengubah cara kita berwisata. Informasi tentang destinasi wisata sekarang lebih mudah diakses, bahkan untuk tempat-tempat yang jauh sekalipun. Hal ini membuat persaingan antar destinasi wisata semakin ketat, sehingga terus berinovasi dengan teknologi terbaru.⁴⁴

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran meliputi keseluruhan proses penelitian, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian, yang semuanya saling terkait dan membentuk satu kesatuan. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam mengarahkan jalannya penelitian.

⁴⁴ Nasrullah, et al., *Perencanaan Destinasi Pariwisata* (Yayasan Kita Menulis, 2023), 45-50.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan.⁴⁵ Metode penelitian kualitatif dipilih untuk menggali makna dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang akan diteliti.

Metode kualitatif adalah pendekatan yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena dengan mempertimbangkan persepsi dan pengalaman individu. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan disajikan dalam bentuk narasi lisan atau tulisan untuk menggambarkan objek atau peristiwa yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan pada konteks dan makna daripada angka atau statistik. Peneliti harus memiliki wawasan yang luas dan kemampuan analisis yang baik, karena berinteraksi langsung dengan objek penelitian melalui wawancara atau observasi. Keberhasilan penelitian bergantung pada komunikasi yang efektif antara peneliti dan responden.⁴⁶

⁴⁵ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022), 15.

⁴⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), 6.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti mendapatkan data untuk di analisis untuk digunakan dalam penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Lokasi penelitian ini mudah di jangkau oleh peneliti sehingga bisa mendapatkan data-data untuk penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sebagai pengumpul data sangat diperlukan untuk hadir di Lokasi penelitian dan telah di ketahui oleh pihak-pihak tertentu. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting untuk memberikan informasi dan data yang benar untuk penelitian, namun tidak menutup kemungkinan peneliti membutuhkan waktu untuk mendapatkan data apabila ada situasi dan kondisi yang tidak terduga.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder berikut penjelasannya:

a. Sumber data primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama, tanpa keterlibatan pihak ketiga. Peneliti dapat memperoleh data yang lebih valid dan relevan, sehingga informasi yang didapatkan lebih akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, skripsi, jurnal, atau bahan lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁴⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran. Metode ini juga bisa diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan data sistematis fenomena yang diselidiki.⁴⁸ Metode ini digunakan untuk memperoleh data pada Kerjasama Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi

2) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal yang menjadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Oleh sebab itu wawancara diawali dengan permohonan izin, pembuatan kesepakatan mengenai waktu, tempat dan durasi waktu yang diperlukan sehingga terjalin komunikasi yang

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225-308.

⁴⁸ Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 104.

harmonis antara pewawancara dengan informan.⁴⁹ Wawancara dilakukan langsung kepada:

- Muhammad Taufan, S.T (Kepala Desa Kaleke)
- Fahmi (Direktur BUMDes Desa Kaleke)
- Muhammad Syahid (Ketua Pokdarwis Desa Kaleke)
- Masyarakat Desa Kaleke (7 orang masyarakat Desa Kaleke)

3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata "dokumen," yang merujuk pada berbagai jenis benda tertulis yang digunakan untuk merekam informasi atau data. Ini mencakup buku, majalah, arsip, catatan harian, surat, laporan, dan dokumen lain yang mengandung informasi bernilai.⁵⁰

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, sampai data mencapai kejenuhan.⁵¹ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data atau penyusunan ulang informasi dilakukan dengan fokus pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau disimpulkan. Proses ini bisa dilakukan melalui abstraksi atau merangkum informasi yang relevan agar tetap

⁴⁹Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cet: VIII; Bandung : Bumi Aksara, 2006), 133.

⁵⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 202.

⁵¹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009), 90-91.

terjaga dalam penelitian. Dengan demikian, reduksi data merupakan proses yang dilakukan peneliti secara berkesinambungan selama penelitian untuk mengidentifikasi inti dari data yang terkumpul. Tujuan dari reduksi adalah untuk menyaring informasi yang kompleks dan menghilangkan data yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian, yang sering kali tercampur dengan data yang relevan.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyusun informasi secara terstruktur agar kesimpulan dapat ditarik. Hal ini penting karena data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif sering kali berbentuk naratif, sehingga perlu disederhanakan tanpa mengurangi maknanya. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh. Pada tahap ini, peneliti berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan inti permasalahan, dimulai dengan pengelompokan berdasarkan setiap pokok masalah.

3) Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar yang digunakan dalam penelitian tersebut.⁵²

⁵² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), 47-48.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu memastikan bahwa data yang kumpulan benar-benar valid dan bisa diandalkan. Untuk itu menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda.

Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi dimaknai sebagai proses pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai metode dan pada berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat beberapa jenis triangulasi yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengevaluasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sebagai contoh, untuk menilai kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, data dikumpulkan dan diperiksa dari bawahan, atasan, dan rekan kerja. Data yang diperoleh dari ketiga sumber ini tidak digabungkan seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan dijelaskan dan dikategorikan untuk menyoroti kesamaan, perbedaan, serta hal-hal yang spesifik dari masing-masing sumber. Setelah dianalisis, peneliti akan menarik kesimpulan dan meminta konfirmasi (member check) dari ketiga sumber tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data yang sama menggunakan berbagai teknik. Sebagai contoh, data yang diperoleh melalui wawancara bisa diverifikasi dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Jika hasil dari ketiga teknik tersebut berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data atau pihak lain

untuk menentukan data mana yang dianggap lebih akurat, atau mungkin semua data tersebut benar karena berasal dari sudut pandang yang berbeda.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga dapat memengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui wawancara di pagi hari, ketika narasumber masih segar dan belum menghadapi banyak masalah, cenderung lebih valid dan kredibel. Oleh karena itu, untuk menguji kredibilitas data, pengecekan dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil uji menunjukkan perbedaan data, proses tersebut dilakukan berulang kali hingga diperoleh kepastian mengenai data yang valid.⁵³

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 273-2174.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Desa Kaleke

a. Sejarah Desa Kaleke

Penduduk awal Desa Kaleke berasal dari pegunungan barat Sigi, dikenal sebagai *Bulunti*. Akibat wabah belalang dan ulat yang merusak lahan pertanian, mereka berpindah ke berbagai wilayah hingga menetap di *Tamotumpu* yang berarti "tanah tak bertuan" dalam dialek *Ta'a*. Di tempat ini, dua klan besar *To Dolo* dan *To Sambo* bertemu dan hidup berdampingan. *Tamotumpu* menjadi saksi berbagai peristiwa penting, termasuk Peristiwa *Gau Goa* yang merupakan konflik antara penduduk *Palu* dan *Tamotumpu* akibat pembunuhan kerbau milik *Magau Palu*. Perang ini akhirnya memaksa penduduk untuk bermigrasi, hingga mereka menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Kaleke.

Nama Kaleke berasal dari rumput liar *Taleke Nu Bengga* yang tumbuh di wilayah tersebut. Kaleke memiliki warisan sejarah yang kaya, termasuk situs megalitikum di *Bululanga*, tempat makam tokoh penting seperti *Baligau* anak Raja Dolo, dan *Tombolotutu* seorang pemimpin yang melarikan diri dari penjajah Belanda. Wilayah *Rangata* kemudian menjadi pusat pemerintahan dan perjuangan melawan penjajahan, termasuk pergerakan Laskar Merah Putih dan Sarikat Islam. *Rabinangga* atau *Dusun 2* juga memiliki peran strategis dengan sejarah konflik yang akhirnya diselesaikan secara damai oleh raja pada masa itu.⁵⁴

⁵⁴ Profil Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Tahun 2023

b. Visi dan Misi

1) Visi

Kaleke Desa destinasi maju beradat dan Religius.

2) Misi

- a) Menjadikan Kaleke sebagai desa destinasi wisata (Alam, Sejarah Religius).
- b) Meningkatkan produktivitas masyarakat dalam bidang pertanian sebagai hulu pengembangan agribisnis.
- c) Menumbuhkembangkan kegiatan keagamaan di desa.
- d) Melestarikan adat dan budaya berbasis pada kearifan lokal.
- e) Menjadikan pemuda dan organisasi pemuda sebagai ujung tombak kemajuan desa.
- f) Menjadikan BUMDes sebagai tonggak kemajuan ekonomi masyarakat dan desa.
- g) Mengoptimalkan tata kelola keuangan desa yang partisipatif, transparatif dan akuntabel.
- h) Memaksimalkan peran teknologi dalam pelayanan pemerintah desa.
- i) Membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan desa.
- j) Membangun akses pendidikan dan kesehatan desa.
- k) Membangun sinergitas antara pemerintah desa, BPD, dan LKD.
- l) Menumbuhkan kesadaran tanggap bencana berwawasan kearifan lokal.⁵⁵

⁵⁵ Profil Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Tahun 2023

c. Kondisi Umum Desa

1) Kondisi Geografis

Desa Kaleke merupakan salah satu dari 12 wilayah yang ada diwilayah Kecamatan Dolo Barat yang mempunyai luas wilayah 1.444.000 m² yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pewunu

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rarampadende

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maku

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balumpewa dan Kaluku Tinggi.

Desa kaleke terletak di sebelah barat ibu Kota Kabupaten Sigi yang berjarak 7 km, dan terletak disebelah Selatan Kota Palu yang berjarak 19,5 km. Desa Kaleke mempunyai iklim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan kelembaban udara yang cocok untuk daerah Pertanian. Desa kaleke mempunyai 3 Dusun yaitu Dusun 1 Kaleke berada di Kasolana, dusun 2 Kaleke berada di Wera, dan dusun 3 kaleke berada di Matayona.⁵⁶

2) Demografi Desa

Gambaran demografi menggambarkan karakteristik penduduk suatu wilayah dalam arti luas, termasuk di dalamnya perkembangan dan persebarannya. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal dasar yang efektif untuk pembangunan yang berkelanjutan.

⁵⁶ Profil Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Tahun 2023

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2023 yaitu :

Jumlah Penduduk 2.508 Jiwa, dengan Jumlah KK 802 terdiri atas :

Laki-laki : 1.265 jiwa

Perempuan : 1.243 jiwa

2) Kondisi Fasilitas Publik

a) Kantor Desa : 1 Unit

b) Prasarana Kesehatan

- Puskesmas : 1 Unit

- Posyandu : 3 Unit

c) Sarana Pendidikan

- TK : 3 Unit

- Sekolah Dasar : 3 Unit

- SMP/MTs : 1 Unit

d) Prasarana Ibadah

- Masjid : 3 Unit

- Mushola : 2 Unit

- Taman Pengajian : 1 Unit

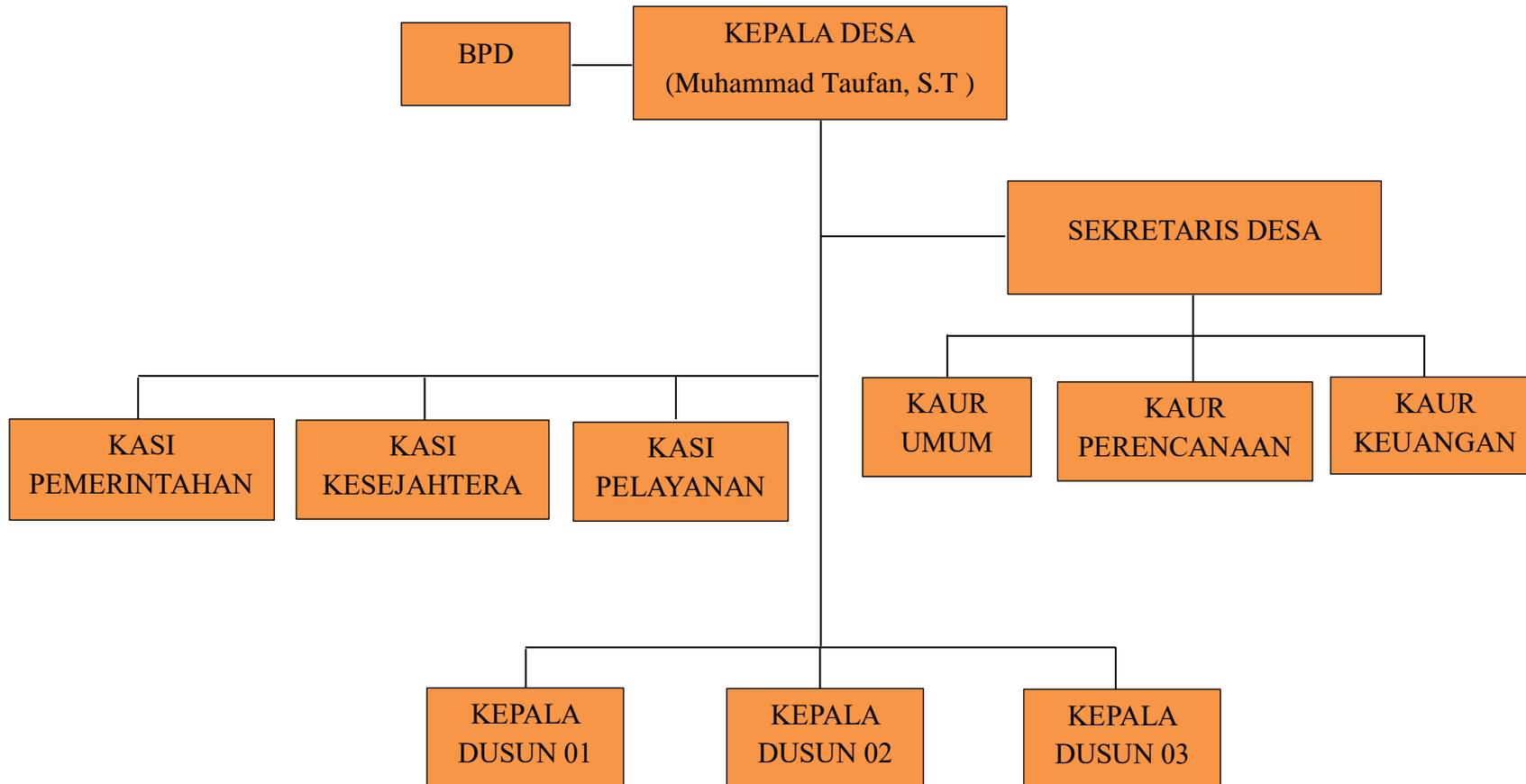
e) Prasarana Umum

- Balai Pertemuan : 1 Unit

- Pos IB : 1 Unit

- Lapangan : 3 Unit

3) Struktur Pemerintah Desa



Sumber: Profil Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Tahun 2023

2. Profil BUMDes Desa Kaleke

a. Sejarah BUMDes

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum, bukan lagi badan usaha.⁵⁷ Berdasarkan Peraturan Desa Kaleke nomor 07 tahun 2023 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa *Sigampa Sejahtera* yang selanjutnya disebut BUMDes *Sigampa Sejahtera* adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Kaleke guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa Kaleke.⁵⁸

b. Pengurus BUMDes

Pengurus BUMDes *Sigampa Sejahtera* terdiri dari individu-individu yang berkomitmen tinggi dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut daftar pengurus BUMDes *Sigampa Sejahtera* beserta jabatannya:

Tabel 4.1
Pengurus BUMDes *Sigampa Sejahtera*

| No | Nama | Jabatan |
|----|---------------------|-----------------|
| 1 | Fahmi Badrun, S.Pd. | Direktur BUMDes |
| 2 | Nurul Utami, S.H. | Sekretaris |
| 3 | Nelam Ayu Kusuma | Bendahara |

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.

⁵⁸ Peraturan Desa Kaleke Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa SIGAMPA SEJAHTERA.

| | | |
|---|-----------|--|
| 4 | Pokdarwis | Unit Pengelola Mata Air dan Wisata |
| 5 | Jardin | Unit Jasa Penyewaan Tenda dan Panggung Hajatan |

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2025)

Dengan adanya pengurus yang kompeten dan bertanggungjawab, BUMDes diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan.

c. Usaha-Usaha BUMDes

BUMDes Sigampa Sejahtera saat ini mengelola dua unit usaha yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa sekaligus mendukung pengembangan potensi lokal. adapun kedua unit usaha itu ialah sebagai berikut:

1) Unit pengelolaan mata air dan wisata

Unit ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa Kaleke, bukan hanya sebagai kebutuhan masyarakat tetapi juga menjadi daya tarik wisata. Dalam pengelolaannya BUMDes bekerjasama dengan Pokdarwis untuk memastikan penggunaan air yang efisien dan berkelanjutan.

Salah satu kebijakan yang diberlakukan ialah pemberlakuan tarif pada masyarakat di luar Desa Kaleke ketika mengambil air dalam jumlah yang banyak sebesar Rp1.000 per galon. Adapun tarif ini diberlakukan untuk menjaga keberlanjutan operasional dan perawatan sumber mata air. Selain itu, kerjasama dengan Pokdarwis juga mencakup pengelolaan wisata. hal ini tidak hanya berkontribusi pada pendapatan Desa tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan potensi pariwisata lokal.

2) Unit jasa penyewaan tenda dan panggung hajatan

Unit ini melayani kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan acara seperti pernikahan, hajatan dan kegiatan sosial lainnya. Penyewaan tenda dan panggung menjadi solusi bagi masyarakat, karena dikenakan tarif yang lebih terjangkau dibandingkan layanan dari luar desa. Unit ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi sumber pendapatan tambahan untuk BUMDes.⁵⁹

3. Profil Pokdarwis Desa Kaleke

a. Sejarah Pokdarwis

Berdasarkan Peraturan Desa Kaleke tentang Sistem Pemeliharaan dan Pengelolaan Mata Air Desa Kaleke, Kelompok Sadar Wisata Desa Kaleke (Pokdarwis) yaitu tim kerja yang ditunjuk sebagai pelestarian dan pengelolaan terhadap pemanfaatan sarana air bersih. Pokdarwis berkewajiban membersihkan dan memelihara sumber-sumber mata air di Desa Kaleke, Pokdarwis berkewajiban memberi himbauan atau peringatan tertulis di titik-titik sumber mata air dan juga aliran air di desa Kaleke, Pokdarwis wajib memungut biaya sebesar Rp. 1000 untuk setiap galon air yang diambil oleh Masyarakat dari luar desa Kaleke yang telah mendapatkan persetujuan pemerintah desa Kaleke untuk mengambil air dari mata Air di Desa Kaleke, Pokdarwis wajib menghitung dan mencatat pemasukan dan pengeluaran dari setiap pungutan yang di ambil dari para pedagang air yang diambil dari desa Kaleke pada buku kas umum dan dilaporkan setiap hari kepada pemerintah desa Kaleke melalui Bumdesa Kaleke, Bumdes

⁵⁹ Fahmi, Direktur BUMDes Sigampa Sejahtera Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 25 Februari 2025.

mewakili pemerintah desa berhak mengevaluasi kinerja dan laporan keuangan yang dilaporkan oleh Pokdarwis, dan Pokdarwis berhak mendapatkan presentase pembagian keuntungan pengelolaan air sebesar 40% untuk pengelola, 15% kas pokdarwis dan sisanya 45% bagi hasil ke desa melalui Bumdes.⁶⁰

b. Pengurus Pokdarwis

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Kaleke merupakan suatu perkumpulan masyarakat yang berpartisipasi dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang ada di desa. Kepengurusan Pokdarwis terdiri dari individu-individu yang memiliki dedikasi untuk memajukan sektor pariwisata dengan berbagai peran dan tanggungjawab. Berikut tabel susunan pengurus Pokdarwis Desa Kaleke:

Tabel 4.2
Pengurus Pokdarwis Desa Kaleke

| No | Nama | Jabatan |
|----|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Muhammad Syahid | Ketua |
| 2 | Restu Didit Agung | Sekretaris |
| 3 | Nhita Tiara Syafriana | Bendahara |
| 4 | Afdhal | PJ Divisi Keamanan dan Ketertiban |
| 5 | Nurfa | PJ Divisi Keindahan |
| 6 | Pemuda Pemudi Desa Kaleke | Anggota |

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2025)

Dengan adanya kepengurusan yang terstruktur, diharapkan Pokdarwis dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan daya tarik wisata. Serta dapat

⁶⁰ Peraturan Desa Kaleke tentang Sistem Pemeliharaan dan Pengelolaan Mata Air Desa Kaleke Tahun 2024.

menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pengunjung dan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.

4. Gambaran Kondisi Permandian Bionga

Permandian Bionga berada di Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi yang memiliki keindahan pegunungan yang hijau dan sejuk, yang menjadikannya sebagai tempat ideal untuk berlibur bersama keluarga dan teman-teman. Salah satu yang menjadi daya tarik permandian ini ialah airnya yang jernih dan segar karena berasal dari sumber mata air yang alami, serta sebagian masyarakat mengambil air tersebut untuk dikonsumsi sehari-hari. Selain keindahan alam, Permandian Bionga juga menyediakan fasilitas pendukung seperti area parkir, kamar mandi serta warung-warung kecil yang menyajikan makanan dan minuman. Dan pengelola Permandian Bionga juga sangat memperhatikan kebersihan dan kenyamanan pengunjung ketika datang berwisata.⁶¹

Permandian Bionga selalu menjadi tujuan wisatawan tiap akhir pekan, tidak hanya warga Sigi yang berwisata tetapi sejumlah warga Kota Palu juga mengunjungi wisata ini. Permandian Bionga berjarak sekitar 35 menit dari pusat Kota Palu.⁶² Selain itu, Permandian Bionga belum ada biaya masuk tetapi harus memperhatikan peraturan-peraturan seperti tidak menggunakan sabun dan sampo di dalam kolam, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak buang popok

⁶¹ Moh. Arif, "Permandian Wisata Bionga Palu : Keindahan Alam Yang Menyegarkan," *RRI*, 12 Januari 2024, <https://www.rri.co.id/palu/wisata/513495/permandian-wisata-bionga-palu-keindahan-alam-yang-menyegarkan>. (8 Juni 2025).

⁶² Haqir Muhakir, "Permandian Bionga, Wisata Kolam Renang Terjangkau di Sigi," *Tribunnews*, 6 Juni 2021, <https://palu.tribunnews.com/2021/06/06/permandian-bionga-wisata-kolam-renang-terjangkau-di-sigi>. (8 Juni 2025).

bayi sembarangan. Kolam permandian tidak terlalu dalam hanya sekitar dada orang dewasa atau kurang lebih satu meter.⁶³

Kolam di Permandian Bionga memiliki Panjang kurang lebih 9 meter dan lebar kurang lebih 5 meter. Air yang mengalir di kolam berasal dari mata air alami yang ada di atas dan juga di dalam kolam. Selain memiliki mata air untuk di pakai mandi di area kolam, Bionga juga memiliki mata air untuk diminum dan untuk kebutuhan masyarakat. Mata air yang ada di sekitar Bionga ada 6, yang saat ini di manfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan Permandian Bionga.

5. Informan yang terlibat dalam kerjasama

Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang memiliki peran dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke. Adapun para informan terdiri dari berbagai pihak, seperti Kepala Desa, Ketua BUMDes, Ketua Pokdarwis dan Masyarakat setempat yang bekerjasama dalam mendukung pengembangan destinasi wisata. daftar informan yang terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.3
Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan |
|----|-----------------------|------------------------|
| 1 | Muhammad Taufan, S.T. | Kepala Desa Kaleke |
| 2 | Fahmi | Direktur BUMDes |
| 3 | Muhammad Syahid | Ketua Pokdarwis |
| 4 | Gita | Masyarakat Desa Kaleke |

⁶³ Imron, "Ingin Coba Berenang Di Kolam Mata Air? Permandian Bionga Ini Wajib Kamu Kunjungi," *Soal Palu*, 28 Februari 2023, <https://soalpalu.com/2023/02/28/ingin-coba-berenang-di-kolam-mata-air-permandian-bionga-ini-wajib-kamu-kunjungi/>. (8 Juni 2025).

| | | |
|----|-------|------------------------|
| 5 | Fatma | Masyarakat Desa Kaleke |
| 6 | Irma | Masyarakat Desa Kaleke |
| 7 | Ahmad | Masyarakat Desa Kaleke |
| 8 | Helmi | Masyarakat Desa Kaleke |
| 9 | Zul | Masyarakat Desa Kaleke |
| 10 | Nelam | Masyarakat Desa Kaleke |

Keterlibatan berbagai pihak sebagai informan dalam penelitian ini memberikan perspektif yang beragam terkait kerjasama ekonomi di Desa Kaleke. Informasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan gambaran dalam kerjasama ekonomi untuk mendukung pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke secara berkelanjutan.

B. Bentuk Program Kerjasama Ekonomi Antara BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Desa Kaleke Kab. Sigi

Kerjasama ekonomi antara BUMDes dan Pokdarwis di Desa Kaleke untuk mengembangkan destinasi wisata. Selain itu, dibutuhkan pula masyarakat sebagai pendukung utama dalam menjalankan program wisata. Tujuan kerjasama ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi wisata. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya mendukung peningkatan ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya dan keberlanjutan lingkungan.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung kepada Bapak Muhammad taufan, S.T selaku Kepala Desa Kaleke, beliau mengatakan bahwa:

“Insya allah sesuai dengan visi dan misi kami, kami sudah lakukan pengembangan potensi yang kita miliki atau sudah dikenal dengan nama Bionga. Agar supaya bisa membantu kesejahteraan masyarakat. Yang mengelola dan menjaga Bionga itu adalah Pokdarwis, yang mana

Pokdarwis ini salah satu organisasi kepemudaan yang dibentuk setelah dibentuknya BUMDes, karena mungkin berkaitan dengan persoalan wisata kami menetapkan Pokdarwis jadi pengelola mata air Bionga supaya lebih tertata lebih bagus lagi. Dalam pengelolaan pastinya ada hal-hal yang memang membutuhkan persoalan dana, kaya pemeliharaan. Dari pemerintah desa mendukung Pokdarwis itu melalui BUMDes, karena BUMDes ini salah satu kekuatan dari Desa itu sendiri yang mana BUMDes punya dana dari dana desa atau pihak lain. Kalau masyarakat itu banyak membantu dengan bersedia tanahnya dijadikan kolam, ada juga yang bangun gazebo dan wc untuk disewakan”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama ekonomi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke menggunakan kerjasama ekonomi berbasis potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat, yang menjadi fokus utamanya yaitu permandian Bionga. Adapun kerjasama ini melibatkan berbagai pihak seperti BUMDes yang memiliki fungsi sebagai pemodal utama dalam hal pengelolaan dan pengembangan infrastruktur wisata, Pokdarwis yang berfungsi sebagai pengelola permandian Bionga, dan masyarakat yang mendukung dengan peningkatan fasilitas wisata.

Program kerjasama ekonomi di Desa Kaleke melibatkan BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat untuk mendukung pengembangan destinasi wisata. adapun mengenai hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kondisi awal

Kondisi awal sangat mempengaruhi keberhasilan kolaborasi, karena ada banyak faktor dapat berfungsi sebagai pendukung dan penghambat dalam membangun kerjasama antara pemangku kepentingan dan lembaga/organisasi.⁶⁵

⁶⁴ Muhammad Taufan S.T., Kepala Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 25 Februari 2025.

⁶⁵ Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono dan Abd. Rachim, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press, 2020), 76.

Adapun indikator-indikatornya, yaitu:

a. Pengaruh dan Kekuatan

Kerjasama ekonomi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke melibatkan berbagai pihak dengan pengaruh dan kekuatannya masing-masing, seperti BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat.

BUMDes memiliki peran penting dalam pengelolaan destinasi wisata di Desa Kaleke, karena sebagai lembaga yang memiliki dana dari dana desa dan pihak lain. BUMDes memiliki kekuatan finansial untuk mendukung pengembangan destinasi wisata dengan memperbaiki infrastruktur dan memberikan pembiayaan.

Hasil wawancara tersebut, Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes juga mengatakan bahwa:

“Kekuatannya BUMDes itu punya dana yang bisa bantu pengembangan destinasi wisata, dengan ba kasih modal dan perbaiki infrastruktur yang ada di Bionga.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama yang dimiliki BUMDes itu memberikan modal dan perbaikan infrastruktur. Kekuatan finansial yang BUMDes miliki merupakan hal yang penting untuk mendukung pengembangan destinasi wisata, seperti pembangunan infrastruktur wisata serta pemberian modal kepada Pokdarwis dan masyarakat. BUMDes sangat berpengaruh dalam setiap keputusan pengembangan destinasi wisata, karena BUMDes memiliki sumber daya dana untuk membiayai setiap kegiatan.

⁶⁶ Fahmi, Direktur BUMDes Sigampa Sejahtera Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 25 Februari 2025.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Saudara Muhammad Syahid selaku Ketua Pokdarwis, beliau mengatakan bahwa:

“Pokdarwis itu kan ditunjuk jadi pengelola, jadinya kami bertemu langsung dengan pengunjung. Terus kami ba jaga tiap hari, Kami yang punya tanggungjawab untuk semua yang ada di Bionga kaya kebersihan dan keluhan-keluhan dari pengunjung. Terus kami juga ba update tiap hari keadaan bionga di instagram.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, Pokdarwis ini punya peran dalam mengelola langsung tempat wisata, memiliki tanggungjawab terhadap kebersihan dan kepuasan pengunjung, serta melakukan promosi wisata.

Pokdarwis memiliki pengaruh karena mereka yang menjalankan kegiatan operasional harian dan bertemu langsung dengan pengunjung setiap hari. Oleh karena itu, memberikan mereka kekuatan untuk mengatur pengalaman pengunjung dan kualitas layanan yang diberikan. Kekuatan Pokdarwis pada tanggungjawab mereka terhadap kelancaran operasional harian.

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke. Hasil wawancara dengan Saudari Gita, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya aktif sekali ikut kegiatan yang ada di Desa, kegiatan bionga *festival* musik waktu itu yang paling besar saya ikut.”⁶⁸

Kemudian Ibu Irma menambahkan:

“Saya ba jual disini, ba jual makanan nasi kuning, mie sama minuman.”⁶⁹

⁶⁷ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025.

⁶⁸ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁶⁹ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Zul, beliau mengatakan bahwa:

“Saya punya kerajinan tangan untuk mendukung pengembangan destinasi wisata, kerajinan tangan itu bisa jadi daya tarik untuk orang-orang yang datang.”⁷⁰

Kemudian Saudari Nelam menambahkan:

“Kalau untuk pengembangan destinasi wisata saya ba perkenalkan produkku sih, karena itu jadi kekuatan yang saya punya.”⁷¹

Lalu Saudara Helmi menambahkan:

“Setiap ada yang datang biasa lupa bawa tikar untuk duduk-duduk, terus gazebo so full. Jadi saya ba liat itu jadi peluang usaha, makanya saya ba sewakan tikar dan ban.”⁷²

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad, beliau mengatakan bahwa:

“Saya kan punya tanah baru baku depan den Bionga, baru orang-orang datang itu banyak. Jadi saya ba bikin gazebo sama wc, bemanan wc kan cuman berapa saja malah biasa orang pigi menumpang di rumah warga untuk ba ganti atau mau buang air kecil.”⁷³

Kemudian Ibu fatma menambahkan:

“Saya ba memanfaatkan tanahku untuk tempat jual, sama parkir. Tapi yang ba jual disini bukan saya sendiri tapi banyak, tapi orang-orang disini sendiri.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa, masyarakat berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan destinasi wisata. Melalui,

⁷⁰ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

⁷¹ Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 5 Maret 2025

⁷² Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁷³ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁷⁴ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

partisipasi dalam kegiatan promosi, penyediaan fasilitas, dan pemberdayaan ekonomi.

Masyarakat berperan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan penyediaan fasilitas tambahan di sekitar tempat wisata. Mereka berpartisipasi dalam menyediakan makanan, kerajinan tangan, serta fasilitas tambahan seperti gazebo dan wc. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata dapat menciptakan daya tarik wisata dan keberlanjutan dari destinasi wisata yang ada di Desa Kaleke.

Maka, pengaruh dan kekuatan antara BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat sangat penting dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke. BUMDes memiliki kekuatan finansial yang dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur wisata, Pokdarwis yang berperan sebagai pengelola dan menjalankan tanggungjawab operasional setiap hari, dan masyarakat yang memberikan kontribusi ekonomi dan fasilitas tambahan di sekitar destinasi wisata.

b. Sumber daya

Kerjasama ekonomi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat. Seperti, sumber daya keuangan, tenaga kerja, serta produk dan fasilitas yang menambah daya tarik wisata.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes, beliau mengatakan bahwa:

“BUMDes itukan penggerak ekonomi di desa. Jadi, kami itu mendukung pengembangan destinasi dengan memberikan modal untuk fasilitas di

Bionga atau pembebasan lahan.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, sumber daya keuangan yang dimiliki BUMDes merupakan kekuatan utama dalam pengembangan destinasi wisata.

Kemudian, Saudara Muhammad Syahid selaku Ketua Pokdarwis menambahkan:

“Kami kan punya tanggungjawab untuk ba kelola bionga, jadi kami tiap hari ada di Bionga ba arahkan orang datang dan ba jaga kebersihan.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pokdarwis memiliki tanggungjawab dalam operasional harian wisata, seperti mengelola dengan memberikan pelayanan kepada pengunjung dan menjaga tempat wisata.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke. Saudari Gita mengatakan bahwa:

“Saya ikut kegiatan promosi terus juga ba jual makanan di Bionga.”⁷⁷

Ibu Fatma menambahkan, Bahwa:

“Saya ba kasih tanahku dijadikan tempat ba jual sama parkir, saya juga ba jual pisang goreng disini.”⁷⁸

Kemudian Bapak Zul mengatakan:

“Kerajinan tangaku saya jadikan souvenir untuk orang-orang yang datang kalau mau beli.”⁷⁹

⁷⁵ Muhammad Taufan S.T., Kepala Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 25 Februari 2025.

⁷⁶ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025.

⁷⁷ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁷⁸ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁷⁹ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

Selain itu, Bapak Ahmad mengatakan:

“Saya bikin gazebo sama wc untuk disewakan sama orang-orang yang datang.”⁸⁰

Ibu Irma menambahkan, bahwa:

“Saya buka warung makan, saya jual nasi kuning, minuman sama gorengan.”⁸¹

Saudara Helmi mengatakan:

“Saya ba sewakan ban dengan tikar untuk orang-orang yang datang ke Bionga.”⁸²

Dan Saudari Nelam menambahkan bahwa:

“Produkku saya jadikan paket wisata, jadi saya ba jual produkku sama orang-orang yang datang di Bionga.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki.

Kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat saling melengkapi dengan sumber daya yang dimiliki. BUMDes berperan sebagai pemodal yang mendukung pengembangan destinasi, Pokdarwis memiliki peran sebagai pengelola destinasi wisata dan masyarakat sebagai pendukung menyediakan produk wisata dan fasilitas yang menarik minat wisatawan.

Pemeliharaan sumber daya yang dimiliki berbagai pihak mendukung pengembangan destinasi wisata. Kerjasama yang baik antara BUMDes, Pokdarwis

⁸⁰ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁸¹ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁸² Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁸³ Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 5 Maret 2025

dan masyarakat dapat memperkuat ekonomi masyarakat lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama yang terjalin tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata dari sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak, tetapi memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat Desa Kaleke. Oleh karena itu, untuk keberlanjutan kerjasama ini diperlukan adanya evaluasi terhadap kerjasama yang terjalin, pendapatan dan manfaat.

c. Pengetahuan

Pengatahuan merupakan hal penting untuk mendukung kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat Desa Kaleke dalam pengembangan destinasi wisata. Setiap pihak memberikan kontribusi informasi dan keahlian yang dimiliki untuk mengelola destinasi wisata.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes, beliau mengatakan bahwa:

“Kami kan lembaga yang mengatur perekonomian di Desa, kalau untuk sekarang kami masih terus belajar untuk pengelolaan dana di bidang pariwisata.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, BUMDes masih belajar untuk mengelola dana di sektor pariwisata. Masih perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan BUMDes dalam berbisnis di bidang pariwisata, seperti pemberian pelatihan manajemen keuangan dan strategi bisnis kepariwisataan. Maka, BUMDes dapat berkontribusi lebih optimal dalam pengelolaan destinasi wisata dan menggerakkan ekonomi desa.

⁸⁴ Muhammad Taufan S.T., Kepala Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 25 Februari 2025.

Kemudian, Saudara Muhammad Syahid selaku Ketua Pokdarwis menambahkan:

“Pokdarwis sudah punya sedikit pengetahuan tentang pengelolaan tempat wisata, tapi masih butuh pelatihan lagi.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, Pokdarwis sudah memiliki pengetahuan dasar pengelolaan wisata, tapi masih butuh adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis seperti pengelolaan fasilitas, pemasaran destinasi wisata dan pelayanan wisata.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke.

Saudari Gita mengatakan bahwa:

“Saya bagaimana sifat-sifat masyarakat disini, apa lagi anak muda. Mereka itu kalau ada kegiatan promosi di bikin, pasti semangat sekali mo ikut. Tapi kalau untuk pengetahuan tentang pariwisata kaya masih kurang, jadi masih perlu ada pelatihan.”⁸⁶

Ibu Fatma menambahkan, Bahwa:

“Saya sudah lama ba jual di Bionga, jadi saya pikir ba layani orang datang dengan ramah itu sudah bagus. Tapi kayanya perlu ada itu sosialisasi supaya ba tambah pengetahuan untuk kami ibu-ibu ini.”⁸⁷

Kemudian Bapak Zul mengatakan:

“Kerajinan tangan yang saya bikin kan di jadikan paket wisata, terus kami masih butuh pelatihan sih untuk ba tingkatkan jualannya kami.”⁸⁸

Selain itu, Bapak Ahmad mengatakan:

“Saya belajar dari tempat-tempat wisata yang biasa kaya di tanjung karang atau yg pinggir-pinggir pantai itu biasa ada ba bikin tempat untuk duduk-duduk, jadi saya juga buat itu di Bionga.”⁸⁹

⁸⁵ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025.

⁸⁶ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁸⁷ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁸⁸ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

Ibu Irma menambahkan, bahwa:

“Kalau saya ba sediakan makanan itu ba liat apa yang laku jadi itu terus saya jual, saya liat orang datang itu suka apa itu yang saya pertahankan ada terus saya jual.”⁹⁰

Saudara Helmi mengatakan:

“Sarasa kalau pengetahuan itu masih harus di kasih pelatihan lagi, karena kan belum semua masyarakat berpartisipasi ini masih ada yang belum paham jadi kayanya butuh pencerahan.”⁹¹

Dan Saudari Nelam menambahkan bahwa:

“Kami sudah ba sediakan produk untuk paket wisata, tapi kami butuh pelatihan tentang pemasaran di pariwisata atau berbisnis. Supaya kami juga tau bagaimana bisnis di pariwisata sama kami tau penjualannya produknya kami ini bimana.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat Desa Kaleke memiliki potensi besar untuk mengembangkan destinasi wisata. Saat ini, masih perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai potensi wisata yang dimiliki.

Kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat merupakan hal penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian. BUMDes dapat memfasilitasi untuk membuat pelatihan dengan bekerjasama dengan pemerintah atau organisasi terkait. Pokdarwis dapat menjadi pemandu untuk memberikan pengetahuan tentang pengelolaan destinasi wisata. Serta, masyarakat

⁸⁹ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁹⁰ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁹¹ Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁹² Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 5 Maret 2025

berpartisipasi dengan kreativitasnya terhadap produk lokal dan promosi destinasi wisata.

Dalam kerjasama semua pihak menyadari bahwa masih perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan atau wawasan baik itu BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat. Dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan wawasan, kerjasama ini dapat memberikan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan dari destinasi wisata.

2. Desain kelembagaan

Desain kelembagaan berkaitan dengan struktur dan mekanisme yang mendasari pelaksanaan kolaborasi. Aspek ini sangat penting karena memberikan prosedural yang sah untuk proses kolaborasi yang dijalankan.⁹³ Adapun indikator-indikatornya, yaitu:

a. Partisipasi

Kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke, tidak hanya mencakup aspek perencanaan dan pelaksanaan tetapi juga pemberdayaan ekonomi yang memperkuat keberlanjutan destinasi wisata.

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang mendukung pengembangan destinasi wisata melalui pembiayaan dan pengelolaan keuangan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes, beliau mengatakan bahwa:

⁹³ Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono dan Abd. Rachim, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press, 2020), 77.

“Kami tentunya terlibat terus kalau ada rencana sama pelaksanaan pengembangan, karena kembali lagi perannya kami itu kan ba biayai maka kami terlibat terus.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, BUMDes berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengembangan destinasi wisata. Karena, BUMDes berperan sebagai pemberi dana sehingga mereka pasti akan selalu terlibat.

Sementara itu, Pokdarwis memiliki peran utama dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Peneliti melakukan wawancara dengan Saudara Muhammad Syahid selaku Ketua Pokdarwis mengatakan:

“Pokdarwis sudah pasti terlibat karena kan itu tanggungjawabnya kami untuk pengembangan destinasi wisata.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, Pokdarwis memiliki tanggungjawab terhadap tempat wisata makanya mereka akan selalu terlibat dalam proses pengembangan destinasi wisata. Karena, Pokdarwis memiliki peran utama dalam pengembangan destinasi wisata.

Serta, masyarakat Desa Kaleke yang berkontribusi melalui aktivitas ekonomi dalam pengembangan destinasi wisata. Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke. Saudari Gita mengatakan bahwa:

“Saya terlibat ba jual makanan sama ikut kegiatan promosi yang di adakan.”⁹⁶

Ibu Fatma menambahkan, Bahwa:

“Saya bikin warung makan sama jadikan tempat parkir tanahku.”⁹⁷

⁹⁴ Fahmi, Direktur BUMDes Sigampa Sejahtera Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 25 Februari 2025.

⁹⁵ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025.

⁹⁶ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

Kemudian Bapak Zul mengatakan:

“Saya terlibat kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata dengan ikut kegiatan waktu itu ada pelatihan kerajinan tangan, sama ba sediakan kerajinan tangan untuk *souvenir*.”⁹⁸

Selain itu, Bapak Ahmad mengatakan:

“Saya terlibat, yah ini ba manfaatkan tanahku untuk bikin wc sama gazebo untuk di sewa sama orang-orang yang datang.”⁹⁹

Ibu Irma menambahkan, bahwa:

“Saya cuman ba jual makanan saja, supaya te jauh-jauh orang mo ba cari makanan.”¹⁰⁰

Saudara Helmi mengatakan:

“Ba sewakan ban sama tikar sih saya, karena itu yang dibutuhkan orang-orang datang.”¹⁰¹

Dan Saudari Nelam menambahkan bahwa:

“Saya ba sediakan paket wisata, sama ikut rapat perencanaan biasanya.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, masyarakat memiliki peran masing-masing dalam pengembangan destinasi wisata. Keterlibatan mereka tergantung dari sumber daya yang mereka miliki, adanya yang terlibat dalam penyediaan fasilitas, paket wisata dan ada yang ikut dalam proses perencanaan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mendukung pengembangan melalui ekonomi, tetapi juga ikut dalam operasional dan

⁹⁷ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

⁹⁸ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

⁹⁹ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁰⁰ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁰¹ Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁰² Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 5 Maret 2025

perencanaan.

BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat bekerjasama sama dalam perencanaan pengembangan destinasi wisata. Dalam pelaksanaannya BUMDes menyediakan dana, Pokdarwis sebagai pengelola dan masyarakat mendukung melalui peningkatan layanan dan produk wisata.

Kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat Desa Kaleke menggambarkan kerjasama yang baik dalam pengembangan destinasi wisata. Karena, keterlibatan semua pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan ekonomi memastikan keberlanjutan destinasi wisata dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

b. Pembentukan forum

Kerjasama ekonomi merupakan kunci utama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke. BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat bekerjasama untuk menciptakan nilai ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. *Forum* komunikasi menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa kerjasama berlangsung efektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes beliau mengatakan bahwa:

“Pembentukan *forum* itu memang penting sekali, di dalam *forum* kita bisa saling tukar pendapat untuk pengembangan yang dilakukan sekarang. Kalau tempat pertemuan itu biasanya balai desa sama gedung serbaguna.”¹⁰³

¹⁰³ Fahmi, Direktur BUMDes Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 25 Februari 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, pembentukan *forum* itu sangat penting karena jadi tempat bertukar pendapat dan ide dari berbagai pihak. *Forum* itu sudah ada berjalan biasanya di laksanakan di balai desa dan gedung serbaguna.

Saudara Muhammad Syahid selaku Ketua Pokdarwis menambahkan:

“Pembentukan *forum* itu sudah ada, biasanya rapat itu di adakan kalau bukan balai desa pasti di gedung serbaguna. *Forum* itu penting untuk jalannya kerjasama, karena kan itu jadi ruang interaksi.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, *forum* komunikasi sudah ada yang biasa dilakukan di balai desa dan gedung serbaguna. Dengan adanya *forum* komunikasi antar pihak jadi lebih terarah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke.

Hasil wawancara dengan Saudari Gita, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau pembentukan *forum* itu sudah ada, biasa di buat kalau bukan di balai desa pasti di gedung serbaguna. Tapi seringnya di balai desa sih.”¹⁰⁵

Ibu Fatma menambahkan:

“Rapat sering di balai desa, apa pas-pas juga di tengah.”¹⁰⁶

Kemudian, Bapak Zul menambahkan:

“Biasa saya ikut paling di balai desa, bagusnya ada *forum* itu bisa baku bagi pengalaman.”¹⁰⁷

Bapak Ahmad menambahkan:

“Tempatnya paling di balai desa, apa kalau di gedung serbaguna tidak

¹⁰⁴ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025

¹⁰⁵ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁰⁶ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁰⁷ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

banyak yang datang. Apa gedung serbaguna jauh juga dari rumahnya masyarakat.”¹⁰⁸

Kemudian, Ibu Irma menambahkan:

“Tidak ada grub WA, paling kalau mau rapat di kasih undangan.”¹⁰⁹

Lalu, Saudara Helmi mengatakan:

“Paling *forum* itu biasanya ada pas rapat di balai desa, kalau untuk komunikasi lewat *online* belum ada.”¹¹⁰

Saudari Nelam menambahkan:

“*Forum* komunikasi sudah ada dibentuk biasa di balai desa, rapat biasanya di bikin itu satu bulan satu kali.”¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, *forum* komunikasi sudah ada di bentuk yang lokasi utama di balai desa. *Forum* komunikasi hanya ada offline belum memanfaatkan media *online*, dan *forum* ini dilaksanakan rutin sekali dalam satu bulan. Meskipun, masih terdapat beberapa kendala dalam *forum* komunikasi.

Keberhasilan kerjasama ekonomi di Desa Kaleke bergantung pada efektivitas *forum* komunikasi yang mampu memfasilitasi kepentingan semua pihak. *Forum* yang terstruktur dengan baik tidak hanya mendukung kerjasama, tetapi juga memberikan peluang ekonomi dan masyarakat lokal.

c. Kejelasan prosedur pelaksanaan

Kejelasan prosedur pelaksanaan merupakan hal penting dalam membangun kerjasama ekonomi yang efektif. Prosedur yang terstruktur

¹⁰⁸ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁰⁹ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹¹⁰ Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹¹¹ Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 5 Maret 2025

mencerminkan kerjasama antar pihak berjalan secara sistematis, transparan dan konsisten. Dengan adanya aturan dan pedoman yang jelas setiap pihak dapat memahami peran dan tanggungjawab masing-masing, sehingga kerjasama dapat berjalan lebih efektif. Adapun, dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke prosedur pelaksanaan jadi tantangan utama dalam kerjasama.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes beliau mengatakan bahwa:

“Prosedur pelaksanaan dalam kerjasama ini belum ada, paling kami jalan cuman kaya dari hasil-hasil rapat saja. Ini sih yang masih perlu untuk di bikin, sebenarnya kerjasama ini belum ada acuannya jadi masih berjalan begitu saja.”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, kerjasama yang terjalin dalam pelaksanaannya belum ada prosedur atau paduan yang menjadi acuan bersama. Prosedur pelaksanaan sangat penting untuk keberlanjutan dari kerjasama, sehingga lebih terstruktur dan terarah.

Saudara Muhammad Syahid selaku Ketua Pokdarwis, menambahkan:

“Belum ada prosedurnya kerjasama ini, jalannya kerjasama ini hanya dari keputusan rapat biasa. Jadi kami ba jalankannya itu sesuai kesepakatan saja. Kalau untuk kaya pedoman resmi begitu belum ada.”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, kerjasama yang saat ini berjalan belum ada pedoman resmi untuk pelaksanaan operasional. Pelaksanaan hanya di dasarkan dari hasil keputusan rapat, tidak ada peraturan yang formal yang mengatur kerjasama ini.

¹¹² Fahmi, Direktur BUMDes Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 25 Februari 2025

¹¹³ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke. Hasil wawancara dengan saudari Gita, beliau mengatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat juga biasa bingung, apa kerjasama ini belum ada pedomannya.”¹¹⁴

Ibu Fatma menambahkan:

“Kerjasama jalan cuman dari hasil rapat saja, kalau prosedur atau peraturan-peraturan begitu belum ada.”¹¹⁵

Selain itu, Bapak Zul mengatakan bahwa:

“Prosedur pelaksanaan belum ada, tapi semoga secepatnya dibuat. Karena, kalau jalan sesuai hasil rapat terus kerjasama ini pasti tidak berlanjut.”¹¹⁶

Bapak Ahmad menambahkan:

“Belum ada kalau prosedur begitu, itu bikin masyarakat bingung. Apa tidak tau fungsinya jadi apa di kerjasama.”¹¹⁷

Kemudian, Ibu Irma menambahkan:

“Kerjasama ini ada cuman karena dari hasil rapat, belum ada prosedur yang ba atur.”¹¹⁸

Saudara Helmi menyatakan bahwa:

“Sekarang ini belum ada prosedurnya, semoga secepatnya dibikin supaya kerjasama ini juga terarah tidak hanya dimulut.”¹¹⁹

Kemudian Saudari Nelam menambahkan, bahwa:

“Kerjasama ini sudah banyak yang terlibat, ada BUMDes, Pokdarwis sama masyarakat. Tapi prosedurnya belum jelas, jadinya semua yang dibikin itu cuman hasil kesepakatan tiap rapat saja.”¹²⁰

¹¹⁴ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹¹⁵ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹¹⁶ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

¹¹⁷ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹¹⁸ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹¹⁹ Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹²⁰ Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 5 Maret 2025

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama yang melibatkan BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat belum memiliki prosedur pelaksanaan sebagai acuan. Hal ini seharusnya sangat penting untuk pelaksanaan kerjasama, seperti menyusun SOP atau peraturan-peraturan.

Tidak adanya prosedur pelaksanaan dalam kerjasama tidak hanya mengakibatkan kebingungan kepada masyarakat, tetapi juga mempengaruhi keberlanjutan kerjasama. Tanpa panduan yang jelas membuat kerjasama rentan mudah terjadi salah paham. Maka, penting untuk membuat prosedur pelaksanaan sehingga dapat mendukung pengembangan destinasi wisata secara optimal.

d. Transparansi

Transparansi merupakan hal penting dalam menciptakan kerjasama ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Dalam hal, pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke transparansi untuk membangun kepercayaan antar pihak-pihak yang terlibat.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes beliau mengatakan bahwa:

“Belum semuanya transparan, karena kembali lagi tadi kalau prosedur itu belum ada. Tapi kalau dari kami BUMDes kalau pelaporan pendapatan di rapat, semua yang ikut kerjasama pasti ada disitu. Disitu kami melaporkan hasil penjualan air bersih yang kami terima dari Pokdarwis, yang pendapatannya itu sekarang alhamdulillah sudah jadi PAD terus kami kelola untuk kebutuhan masyarakat Kaleke.”¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, meskipun adanya upaya pelaporan pendapatan penjualan air bersih dari BUMDes. Tapi, dengan tidak adanya pedoman pelaksanaan menjadikan transparansi dalam kerjasama ekonomi di

¹²¹ Fahmi, Direktur BUMDes Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 25 Februari 2025

Desa Kaleke belum optimal. Dengan adanya prosedur pelaksanaan akan membuat kerjasama menjadi lebih terstruktur, baik dari pelaporan pendapatan, pembagian keuntungan sampai dengan pengelolaan Pendapatan Asli Desa.

Kemudian, saudara Muhammad Syahid menambahkan:

“Kalau untuk transparansi mungkin belum semua, tapi kalau untuk perencanaan itu ada diskusi di dalam *forum*. Makanya kerjasama ini belum terlalu transparan karena prosedur itu belum ada disusun.”¹²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, transparansi pada kerjasama ekonomi di Desa Kaleke masih terbatas. Meskipun ada perencanaan melalui *forum* diskusi, tidak adanya prosedur pelaksanaan penyebab utama kurangnya transparansi dalam kerjasama.

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke. Hasil wawancara dengan Saudari Gita, beliau mengatakan:

“Biasa yang ada hanya pelaporan penjualan air bersih, kalau tahan pelaksanaan itu kaya belum jelas.”¹²³

Ibu Fatma menambahkan:

“Belum terlalu transparan sih, karena kami tidak terlalu tau kerjasama ini.”¹²⁴

Kemudian Bapak Zul menambahkan:

“Panduan pelaksanaan penting sekali di bikin memang, karena kita tidak tau apakah transparan atau bagaimana ini kerjasama karena tidak di tau bagaimana acuannya.”¹²⁵

¹²² Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025

¹²³ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹²⁴ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹²⁵ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

Bapak Ahmad menambahkan:

“Belum transparan, apa saya belum terlalu mengerti bagaimana saya mau bekerjasama.”¹²⁶

Selain itu, Ibu Irma menyatakan bahwa:

“Tidak tau juga, apa peraturan-peraturan kerjasama juga belum ada jadi saya tidak tau juga sudah transparan atau belum.”¹²⁷

Saudara Helmi menambahkan:

“Kalau transparansi kerjasama kayanya belum, apa belum ada prosedur pelaksanaan jadi kami tidak tau juga bagaimana sebenarnya. Tapi kalau laporan pendapatan BUMDes dengan Pokdarwis biasanya ba laporkan itu di forum.”¹²⁸

Kemudian Saudari Nelam menyatakan:

“Di rapatkan biasa ba bahas perencanaan juga, walaupun sudah tukar pendapat tapi tidak bisa di pastikan juga sudah transparan kerjasama ini. Apa prosedur kan belum ada di buat jadi tidak tau transparan atau tida.”¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa transparansi dalam kerjasama ekonomi di Desa Kaleke masih menjadi masalah. Karena, banyak yang beranggapan tidak adanya prosedur pelaksanaan atau pedoman yang jelas sulit untuk memastikan kalau kerjasama yang terjalin transparan.

Transparansi dalam kerjasama ekonomi di Desa Kaleke masih belum optimal. Walaupun pelaporan penjualan air bersih telah di lakukan di *forum* diskusi, tidak adanya prosedur pelaksanaan menjadi hambatan utama dalam memastikan transparansi. Maka, perlu adanya penyusunan prosedur pelaksanaan.

¹²⁶ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹²⁷ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹²⁸ Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹²⁹ Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

Adapun prosedur mencakup langkah-langkah operasional yang jelas, pembagian tanggungjawab dan mekanisme evaluasi transparansi.

3. Kepemimpinan

Proses kolaborasi sering kali dipengaruhi oleh konflik dan ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan, meskipun dorongan untuk berpartisipasi tetap kuat.¹³⁰ Adapun indikator-indikatornya yaitu:

a. Kepuasan terhadap pemimpin

Kepemimpinan berperan dalam memastikan keberhasilan kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes beliau mengatakan bahwa:

“Pemimpin dalam kerjasama ini kan kepala Desa, beliau sangat mendukung adanya pengembangan makanya kami selaku BUMDes ikut dalam kerjasama ini.”¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, peran pemimpin dalam pengembangan destinasi wisata merupakan hal yang sangat penting. Dukungan dari kepala Desa memberikan landasan yang kuat sehingga BUMDes ikut berpartisipasi dalam kerjasama ini. Komitmen dari pemimpin ini mencerminkan pentingnya kepemimpinan yang aktif dalam kerjasama.

¹³⁰ Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono dan Abd. Rachim, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press, 2020), 77.

¹³¹ Fahmi, Direktur BUMDes Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 25 Februari 2025

Kemudian Saudara Muhammad Syahid menambahkan:

“Saya rasa dengan dibentuknya Pokdarwis karena ada potensi wisata itu sudah bisa dilihat kalau pemimpin aktif terhadap potensi-potensi yang ada di Desa. Tapi perlu di buat pedoman untuk kerjasama ini biar lebih tertata.”¹³²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, pembentukan Pokdarwis bentuk dari inisiatif pemimpin Desa dalam mengembangkan potensi wisata yang di miliki. Hal ini, menunjukkan bahwa pemimpin di Desa Kaleke sudah menjalankan tugasnya dengan berusaha memanfaatkan potensi yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Desa.

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke. Saudara Gita mengatakan bahwa:

“Pemimpin peduli sekali sih sama pengembangan destinasi wisata, tapi masih banyak kurangnya kaya prosedur pelaksanaan belum ada. Sama belum semua masyarakat ikut aktif di dalam.”¹³³

Kemudian Ibu Fatma menambahkan:

“Kepala Desa sekarang memang sudah bagus, jadinya lebih teratur itu Bionga.”¹³⁴

Bapak Zul menambahkan bahwa:

“Bionga ini kan belum ta kelola dengan baik, tapi karena pemimpinnya kita orang yang bagus ba pimpin jadi sedikit demi sedikit ada pengembangan dari pengelolaan Bionga.”¹³⁵

Lalu, Bapak ahmad menyatakan:

“Pemimpinnya kita sudah bagus sekali, apa lagi diskusi beliau terbuka

¹³² Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025

¹³³ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹³⁴ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹³⁵ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

sekali sama masyarakat.”¹³⁶

Ibu Irma menambahkan:

“Kalau saya puas sekali, kepala desa peduli sekali sama Bionga jadi ada dampaknya dengan kami. Rame terus orang datang jadi kami juga punya banyak pembeli.”¹³⁷

Saudara Helmi mengatakan:

“Menurutku beliau bagus sekali jadi pemimpin. Karena, beliau itu ramah apa lagi kalau anak muda berpartisipasi sekali dengan potensi-potensi Desa beliau senang sekali. Beliau suka sekali kalau anak muda ikut dalam kerjasama ini.”¹³⁸

Kemudian saudari Nelam Menambahkan:

“Beliau dukung sekali pengembangan destinasi wisata, apalagi sama produk-produk lokal suka sekali itu beliau. Makanya beliau ajak saya ikut supaya produkku masuk paket wisata.”¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, masyarakat Desa Kaleke memandang Kepala Desa sebagai orang yang peduli, terbuka dan aktif dalam mengembangkan destinasi wisata. Karena, melalui kepemimpinan beliau banyak mendorong berbagai inisiatif seperti pengelolaan destinasi wisata dan pelibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Berbagai pihak menyatakan kepuasan terhadap kepemimpinan Kepala Desa Kaleke dalam memimpin kerjasama. Dukungan yang konsisten serta keterbukaan terhadap kerjasama menjadi salah satu faktor pendorong pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke. Namun, untuk mencapai

¹³⁶ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹³⁷ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹³⁸ Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹³⁹ Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 5 Maret 2025

kepemimpinan yang lebih optimal perlu dilakukan penyusunan pedoman pelaksanaan dan meningkatkan masyarakat yang terlibat dalam kerjasama.

b. Kemampuan mengelola konflik

Dalam kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke, kemampuan mengelola konflik menjadi aspek penting dalam keberhasilan kerjasama. Proses kerjasama yang melibatkan berbagai pihak tentunya memunculkan banyak perbedaan pendapat.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes beliau mengatakan bahwa:

“Kalau ba selesaikan adanya perbedaan pendapat sejauh ini masih bisa di tangani. Tapi kalau ada konflik yang lebih besar kayanya susah apa belum ada prosedur pelaksanaannya.”¹⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, perbedaan pendapat masih bisa di atasi. Masih ada tantangan yang serius karena tidak adanya prosedur pelaksanaan untuk mengatasi konflik.

Kemudian Saudara Muhammad Syahid menambahkan:

“Pemimpin sudah ba kelola konflik dengan baik, tapi permasalahan itu cuman ta ulang-ulang terus. Karena tidak prosedur yang jelas ba atur kerjasama.”¹⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, pemimpin sudah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola konflik. Tetapi ada permasalahan dalam hal ini, karena tidak adanya prosedur sehingga potensi munculnya konflik yang

¹⁴⁰ Fahmi, Direktur BUMDes Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁴¹ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025

sama terus terjadi.

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke. Saudari Gita mengatakan bahwa:

“Konflik yang biasanya ada itu perbedaan pendapat sih kalau di rapat, tapi kepala desa bisa jadi penengah kalau ada sudah kacau.”¹⁴²

Ibu Fatma menyatakan bahwa:

“Beda pendapat yang sering, tapi kalau konflik yang lain belum. Kepala Desa biasa ba kasih penjelasan.”¹⁴³

Kemudian Bapak Zul menambahkan:

“Kepala Desa ba selesaikan masalah itu sudah baik, apa lgi kalau di forum pasti ada saja beda pendapat. Tapi harus ada prosedur pelaksanaan supaya bisa lebih tersusun lah konfliknya di atasi.”¹⁴⁴

Bapak Ahmad menambahkan:

“Kepala Desa pasti ba dengar pendapatnya semua orang, baru dia ba jelaskan. Jadi bisa di atasi sedikit kalau ada yang beda pendapat.”¹⁴⁵

Lalu, Ibu Irma menyatakan:

“Tiap rapat pasti beda pendapat, Kepala Desa biasa ba kasih penjelasan sama jadi penengah.”¹⁴⁶

Kemudian Saudara Helmi Menambahkan:

“Biasa masalah itu dianggap biasa jadi tidak di selesaikan karena sudah berulang-ulang.”¹⁴⁷

¹⁴² Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁴³ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁴⁴ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

¹⁴⁵ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁴⁶ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁴⁷ Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

Saudari Nelam menyatakan:

“Cukup baik kalau untuk ba kelola konflik, tapi saya harap ada prosedur pelaksanaan supaya konflik tidak ta ulang itu itu terus saja yang terjadi.”¹⁴⁸

Hasil wawancara tersebut bahwa, konflik yang sering terjadi adanya perbedaan pendapat pada saat diskusi. Masyarakat mengakui bahwa kepala Desa sangat baik menjadi penengah dengan memberikan penjelasan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar *forum* tetap kondusif. Namun, konflik ini terus berulang maka perlu adanya prosedur pelaksanaan yang jelas untuk mencengah konflik yang berulang.

Kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik dalam kerjasama telah di apresiasi, terutama dalam menangani perbedaan pendapat pada saat rapat. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan konflik perlu adanya prosedur pelaksanaan yang jelas untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya prosedur pelaksanaan, kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

c. Jumlah kesepakatan yang tercapai

Indikator jumlah kesepakatan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pemimpin dalam pengambilan keputusan. Seperti pada kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke yang membentuk *forum* diskusi untuk membangun komunikasi antar pihak.

¹⁴⁸ Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes beliau mengatakan bahwa:

“Kalau dilihat dari kesepakatan yang sudah tercapai, tidak bisa juga di bilang berhasil tapi kalau diliat kepala Desa memang ba dukung sekali pengembangan destinasi wisata. Tapi, kesepakatan itu biasa hanya dari sebagian pihak saja jadi saya rasa berhasilnya pemimpin itu tidak hanya dari jumlahnya tapi dari kesepakatan semua pihak.”¹⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, dukungan dari semua pihak sangat penting dalam pengembangan destinasi wisata. Meskipun Kepala Desa sudah memberikan dukungan penuh, tapi keberhasilan pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke bergantung pada kerjasama dari semua pihak untuk mendukung dan menyepakati pengembangan destinasi wisata.

Kemudian Saudara Muhammad Syahid menambahkan:

“Menurutku ada kesepakatan bukan dari semua pihak tapi hanya sebagian, sama ada kesepakatan yang hanya dibicarakan begitu saja.”¹⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, proses pengambilan keputusan di Desa itu tidak melibatkan semua pihak karena masih banyak yang belum terlibat dalam kerjasama ini. Sementara itu, ada juga kesepakatan yang hanya sebatas pembicaraan tidak ada di implementasikan.

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke. Saudari Gita mengatakan bahwa:

“Menurutku, jumlah kesepakatan tidak bisa jadi ukuran kalau pemimpin itu berhasil. Karena, dari semua kesepakatan ada juga yang tidak mengerti.”¹⁵¹

¹⁴⁹ Fahmi, Direktur BUMDes Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁵⁰ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025

¹⁵¹ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

Ibu Fatma menyatakan bahwa:

“Mungkin belum, apa belum ta jalan semua hasil rapat atau kesepakatan.”¹⁵²

Kemudian Bapak Zul menambahkan:

“Saya rasa jumlah kesepakatan itu tidak ba kasih liat berhasil atau tida pemimpi ini, tapi bagaimana kesepakatan itu disepakati.”¹⁵³

Bapak Ahmad menambahkan:

“Tidak penting itu jumlahnya, tapi yang penting itu berjalan atau tidak itu kesepakatan.”¹⁵⁴

Lalu, Ibu Irma menyatakan:

“Tidak tau juga, tapi kalau hasil kesepakatan itu tidak semua juga di jalankan.”¹⁵⁵

Kemudian Saudara Helmi Menambahkan:

“Ada juga kesepakatan hanya dari sebagian pihak, jadi tidak bisa diajdiakan tolak ukur jumlahnya sama keberhasilan pemimpin.”¹⁵⁶

Saudari Nelam menyatakan:

“Kesepakatan memang sudah banyak, tapi kalau masalah keberhasilan pemimpin menurutku tergantung dampak yang dikasih dari kesepakatan itu.”¹⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, jumlah kesepakatan belum cukup untuk menilai keberhasilan seorang pemimpin. Tetapi, harus melihat dari

¹⁵² Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁵³ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

¹⁵⁴ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁵⁵ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁵⁶ Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁵⁷ Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

kualitas, dampak dan dijalankannya kesepakatan itu baru bisa di bilang berhasil bukan hanya sekedar dari jumlah yang ada.

Bentuk kerjasama yang melibatkan BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat Desa Kaleke menunjukkan ada potensi besar dalam pengembangan destinasi wisata. Namun, untuk indikator jumlah kesepakatan harus dilihat secara menyeluruh seperti kualitas, penerimaan dan pelaksanaan dari setiap keputusan. Dengan melibatkan lebih banyak pihak dan menjaga kualitas hasil diskusi, keberhasilan pemimpin dalam memfasilitasi kerjasama dapat dilihat dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

4. Proses kolabratif

a. Diskusi antar pihak

Diskusi antar pihak menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kualitas kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat. Diskusi yang efektif membuat semua pihak merasa didengar dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes beliau mengatakan bahwa:

“Rapat ada setiap bulan kalau untuk ba bahas wisata, tapi kalau ada masalah atau hal penting untuk di bahas biasa rapat bisa lebih dari satu kali dalam satu bulan. Tapi ini masalahnya, kalau rapat cuman sedikit yang datang.”¹⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, rapat rutin ada setiap satu bulan sekali. Namun, jika dalam kondisi mendesak rapat bisa satu bulan lebih dari satu kali. Ada salah satu masalah yang memang butuh strategi yaitu rendahnya

¹⁵⁸ Fahmi, Direktur BUMDes Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

partisipasi mengikuti rapat.

Kemudian Saudara Muhammad Syahid menambahkan:

“Kami kalau diskusi itu lebih sering sama BUMDes, kalau ke masyarakat biasa hanya di rapat saja. Kalau sama BUMDes biasa bicara tidak formal cuman duduk-duduk biasa saja.”¹⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, komunikasi antara BUMDes dan Pokdarwis lebih mendalam dari pada masyarakat. Karena, Pokdarwis biasanya berdiskusi dengan BUMDes tidak formal atau hanya melakukan pembicaraan santai. Sementara itu, dengan masyarakat hanya berdiskusi melalui rapat yang secara formal.

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke. Saudari Gita mengatakan bahwa:

“Biasa kami cuman di kasih tau hasil diskusi yang sudah ada.”¹⁶⁰

Ibu Fatma menyatakan bahwa:

“Paling kami diskusi pas rapat saja.”¹⁶¹

Kemudian Bapak Zul menambahkan:

“Menurutku masyarakat jarang di ajak, biasa sudah ada kesepakatan dari BUMDes sama Pokdarwis diskusi baru kami di ajak.”¹⁶²

Bapak Ahmad menambahkan:

“Jarang, paling cuman di ajak rapat di balai desa. Itupun biasa sudah ada memang yang dorang mau baru kami di ajak rapat, mau tidak mau kami setuju-setuju saja.”¹⁶³

¹⁵⁹ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025

¹⁶⁰ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁶¹ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁶² Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

¹⁶³ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

Lalu, Ibu Irma menyatakan:

“Tiada saya diajak diskusi.”¹⁶⁴

Kemudian Saudara Helmi Menambahkan:

“Kalau diskusi sama masyarakat sarasa masih kurang.”¹⁶⁵

Saudari Nelam menyatakan:

“Biasa memang ada rapat, tapi disitu sarasa belum di dengar semua pendapatnya orang. Apa sarasa rapat itu cuman formalitas saja padahal sudah ada rencana yang dibahas tidak dengan masyarakat.”¹⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, meskipun ada *forum* yang dibuat proses pengambilan keputusan di Desa Kaleke belum sepenuhnya terbuka. Maka, perlu adanya pendekatan yang lebih partisipatif untuk memastikan masyarakat memberikan pendapatnya dalam *forum* diskusi.

Untuk meningkatkan diskusi yang terjadi, perlu dibentuk mekanisme diskusi yang lebih partisipatif. Ketika di dalam *forum* masyarakat bisa menyampaikan ide dan masukan bisa membantu keberlanjutan program kerjasama. Dengan meningkatnya keterlibatan semua pihak terutama masyarakat dalam kerjasama ini, maka pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat di Desa Kaleke sudah baik, tetapi masih ada tantangan untuk memastikan komunikasi lebih terbuka. Dengan memperbaiki komunikasi antar pihak, akan mewujudkan kerjasama yang baik dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke.

¹⁶⁴ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁶⁵ Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁶⁶ Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

b. Membangun kepercayaan

Kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke, memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan yang saling menguntungkan. Transparansi, komunikasi dan keterlibatan aktif merupakan hal yang utama untuk membangun dan memperkuat kepercayaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes beliau mengatakan bahwa:

“yang terlibat di kerjasama ini ada Pemerintah Desa yang mempercayakan sama kami, Pokdarwis sama masyarakat. Supaya orang percaya sama BUMDes kami kasih laporan pendapatan setiap rapat. Tapi kami masih berusaha supaya masyarakat bisa terlibat semua.”¹⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, kerjasama yang dijalankan melibatkan Pemerintah Desa, Pokdarwis dan masyarakat. Untuk membangun kepercayaan BUMDes rutin memberikan laporan pendapatan setiap rapat sebagai bentuk transparansi. Selain itu, BUMDes berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kemudian Saudara Muhammad Syahid menambahkan:

“Pihak yang terlibat itu sudah pasti Pokdarwis, ada juga BUMDes, sama masyarakat. Kami paling ba laporkan hasil penjualan air bersih sama BUMDes, terus ba kelola Bionga dengan baik.”¹⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, pihak pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata adalah BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat. Selain itu, terdapat upaya yang dilakukan untuk membangun kepercayaan melalui pelaporan penjualan air bersih kepada BUMDes sebagai

¹⁶⁷ Fahmi, Direktur BUMDes Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁶⁸ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025

bentuk transparansi.

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke. Saudari Gita mengatakan bahwa:

“Saya rasa BUMDes sama Pokdarwis saja yang terlibat sih, karena kan biasa hasil diskusinya dorang baru di lempar di *forum*.”¹⁶⁹

Ibu Fatma menyatakan bahwa:

“Masyarakat kan jarang dilibatkan jadi kepercayaannya kami itu cuman sedikit saja.”¹⁷⁰

Kemudian Bapak Zul menambahkan:

“Sarasa mungkin dari pihak desa sudah berusaha karena kan biasa juga diundang rapat masyarakat tiada datang.”¹⁷¹

Bapak Ahmad menambahkan:

“Saya percaya-percaya saja sama BUMDes, saya cuman ikut saja.”¹⁷²

Lalu, Ibu Irma menyatakan:

“Mungkin karena kami belum tau jalannya kerjasama ini jadi kami belum percaya sekali.”¹⁷³

Kemudian Saudara Helmi Menambahkan:

“Mungkin karena banyak hasil rapat itu tidak dari masyarakat makanya masyarakat kurang percaya.”¹⁷⁴

Saudari Nelam menyatakan:

“Terlibat semua dari BUMDes, Pokdarwis sama masyarakat, tapi sarasa

¹⁶⁹ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁷⁰ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁷¹ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

¹⁷² Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁷³ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁷⁴ Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

cuman BUMDes sama pokdarwis yang dilibatkan.”¹⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, ada beberapa pandangan terkait pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata. Sebagian besar merasa kalau Pokdarwis dan BUMDes lebih menonjol dalam pengambilan keputusan, sementara keterlibatan masyarakat masih terbatas. Rendahnya kepercayaan masyarakat dalam kerjasama karena kurang berpartisipasi, sehingga menghambat keberhasilan kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata.

Komunikasi yang terbuka sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Masyarakat ingin mereka berperan besar dalam pengembangan destinasi wisata, bukan hanya sebagai penerima informasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan meningkatkan rasa kepercayaan terhadap kerjasama yang dijalani.

Meskipun sudah ada beberapa upaya yang dilakukan BUMDes dan Pokdarwis untuk membangun kepercayaan, keberhasilan kerjasama ini tergantung dari peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan kerjasama yang berkelanjutan, maka masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Sehingga, kepercayaan antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat dapat menjadi lebih kuat dan memberikan dampak positif terhadap pengembangan destinasi wisata.

c. Komitmen

Kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke menunjukkan hal yang menarik.

¹⁷⁵ Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

Komitmen menjadi salah satu indikator sejauh mana kolaborasi ini berjalan dengan baik. Komitmen setiap pihak berjalan dengan berbagai aspek seperti pengelolaan keuangan, penyediaan fasilitas, hingga pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes beliau mengatakan bahwa:

“BUMDes pasti punya komitmen yang tinggi, terutama di pengelolaan keuangan. Tapi masalahnya komitmennya masyarakat masih kurang mungkin karena dorang rasa kurang dilibatkan.”¹⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, BUMDes memiliki komitmen yang tinggi dalam pengelolaan keuangan tapi masalahnya kurang keterlibatan masyarakat. Masyarakat mungkin merasa kurang dilibatkan sehingga mereka merasa kurang memiliki tanggungjawab.

Kemudian Saudara Muhammad Syahid menambahkan:

“Pokdarwis berkomitmen sekali, tapi komitmen semua pihak perlu sama supaya tujuannya kerjasama ini bisa tercapai.”¹⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, Pokdarwis memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan peran mereka. Namun, untuk mencapai kerjasama optimal. Komitmen dari semua pihak harus sejalan dan sama.

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke. Saudari Gita mengatakan bahwa:

“Kalau komitmennya BUMDes sama Pokdarwis memang besar, tapi kalau masyarakat kaya masih kurang apa belum ada juga pedoman yang jelas

¹⁷⁶ Fahmi, Direktur BUMDes Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁷⁷ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025

dari kerjasama ini.”¹⁷⁸

Ibu Fatma menyatakan bahwa:

“BUMDes sama Pokdarwis dorang yang utama di kerjasama ini, kalau masyarakat belum terlalu ada karena masih kurang juga kami terlibat.”¹⁷⁹

Kemudian Bapak Zul menambahkan:

“Saya rasa belum ada komitmenku karena belum ada prosedur pelaksana jadi saya tidak tau mau ba apa, kalau cuman mau bertanggung jawab ba sediakan produkku itu sudah saya lakukan tapi kalau yang lain saya tida tau.”¹⁸⁰

Bapak Ahmad menambahkan:

“Saya sudah tanggungjawab sama gazebo dengan wc yang saya bikin. Pasti saya jaga biar tarawat.”¹⁸¹

Lalu, Ibu Irma menyatakan:

“Saya belum terlalu tau kerjasama ini karena tidak ada petunjuknya paling cuman rapat begitu saja.”¹⁸²

Kemudian Saudara Helmi Menambahkan:

“Semua orang mungkin punya komitmen masing-masing tapi karena tidak ada prosedur atau peraturan yang di bikin jadi buat semua orang tidak masih ragu.”¹⁸³

Saudari Nelam menyatakan:

“Punya komitem semua sebenarnya, cuman karena tidak ada prosedur yang jelas makanya tidak satu tujuan.”¹⁸⁴

¹⁷⁸ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁷⁹ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁸⁰ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

¹⁸¹ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁸² Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁸³ Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁸⁴ Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa meskipun komitmen BUMDes dan Pokdarwis sangat kuat, ketererlibatan masyarakat dalam kerjasama ini masih kurang. Sebagian masyarakat merasa kurang terlibat karena tidak adanya pedoman pelaksanaan yang jelas terhadap peran mereka. Ketidakjelasan tersebut membuat mereka ragu mengenai tanggungjawab dan peran mereka dalam kerjasama.

Terjadi kesenjangan komitmen antara pihak-pihak yang terkait. Meskipun BUMDes dan Pokdarwis telah menunjukkan komitmen yang kuat, masyarakat masih merasa peran mereka masih kurang jelas. Tidak adanya prosedur pelaksanaan dalam membangun kerjasama yang baik. Maka, untuk kesetaraan komitmen perlu untuk membuat prosedur pelaksanaan yang jelas mengenai peran dan tanggungjawab setiap pihak dalam pengembangan destinasi wisata.

d. Pemahaman bersama

Pemahaman bersama merupakan hal utama dalam keberhasilan kerjasama pengembangan destinasi wisata. Kerjasama di Desa Kaleke belum adanya kesepahaman antar pihak dalam tujuan, harapan dan tantangan. Hal ini, dipengaruhi karena tidak adanya prosedur pelaksanaan yang jelas dalam melaksanakan kerjasama.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes beliau mengatakan bahwa:

“Saya rasa mungkin karena belum ada prosedur yang jelas jadi belum sepemahaman. Masyarakat hanya fokus ke manfaatnya secara langsung, jadi saya rasa itu tantangannya saat ini.”¹⁸⁵

¹⁸⁵ Fahmi, Direktur BUMDes Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, pemahaman yang sama masih menjadi tantangan dalam kerjasama. Hal ini disebabkan karena belum adanya prosedur pelaksanaan kerjasama, serta masyarakat hanya fokus pada manfaat langsung tanpa memperimbangkan keberlanjutan.

Kemudian Saudara Muhammad Syahid menambahkan:

“Belum satu paham, karena kami biasa fokus ke daya tarik wisata tapi BUMDes cuman fokus ke finansial. Baru masyarakat fokus di manfaat yang didapat saja.”¹⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, perbedaan tujuan menjadi belum adanya kesepahaman dalam kerjasama. Perbedaan prioritas menjadi hambatan, maka diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik.

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke. Saudari Gita mengatakan bahwa:

“Sarasa belum, karena kami juga masih bingung sama ini kerjasama bagaimana kelanjutannya apa belum ada prosedur dibikin.”¹⁸⁷

Ibu Fatma menyatakan bahwa:

“Saya harapanku semoga bionga ini ba kasih manfaat terus untuk kami, tapi saya tidak tau kalau yang lain mungkin sama juga kaya saya.”¹⁸⁸

Kemudian Bapak Zul menambahkan:

“Mungkin belum satu paham, apa saya belum tau juga detail kerjasama ini bemana”¹⁸⁹

¹⁸⁶ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025

¹⁸⁷ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁸⁸ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁸⁹ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

Bapak Ahmad menambahkan:

“Saya masih belum tau sekali tentang kerjasama ini sebenarnya.”¹⁹⁰

Lalu, Ibu Irma menyatakan:

“Saya harap Bionga tetap rame supaya tetap ada pendapatannya kami ba jual disini.”¹⁹¹

Kemudian Saudara Helmi Menambahkan:

“Yang saya tau kerjasama ini untuk pengembangan destinasi wisata tapi kalau tentang hal lain saya belum tau karena belum ada di perlihatkan prosedurnya.”¹⁹²

Saudari Nelam menyatakan:

“Saya rasa kalau tentang tujuan sama harapan pasti beda-beda, karena belum ada peraturan atau pedoman kerjasama ini.”¹⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, sebagian besar masyarakat masih belum memahami secara jelas mengenai prosedur pelaksanaan dalam kerjasama sehingga mereka merasa kurang terlibat. Maka dari itu diperlukan penyusunan prosedur pelaksanaan agar memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan harapan.

Pemahaman bersama dalam kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat di Desa Kaleke belum tercapai karena belum adanya prosedur dalam pelaksanaan kerjasama dan perbedaan prioritas antar pihak.

¹⁹⁰ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁹¹ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁹² Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁹³ Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

e. Hasil menengah

Kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat di Desa Kaleke telah menunjukkan beberapa kemajuan, meskipun masih di tahap awal.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku Direktur BUMDes beliau mengatakan bahwa:

“Sudah ada sedikit kemajuan kaya kolam sudah lebih besar, terus fasilitas lebih banyak. Tapi masih belum maksimal itu, karena belum semua terlibat di pengambilan keputusan.”¹⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, meskipun telah tercapai beberapa kemajuan dalam pengembangan destinasi wisata seperti perluasan kolam dan peningkatan fasilitas keberhasilan yang di capai belum optimal.

Kemudian Saudara Muhammad Syahid menambahkan:

“Kemajuan ada dari pengunjung, kolam juga sudah besar, penjual sudah banyak.”¹⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, terdapat beberapa kemajuan seperti peningkatan jumlah pengunjung, perluasan kolam dan peningkatan fasilitas wisata. Hal ini menunjukkan adanya pengembangan yang positif terhadap pengelolaan fasilitas dan ekonomi di Desa Kaleke.

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke. Saudari Gita mengatakan bahwa:

“Fasilitas sudah lebih bagus, pengunjung juga sudah lebih banyak terus.”¹⁹⁶

¹⁹⁴ Fahmi, Direktur BUMDes Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁹⁵ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025

¹⁹⁶ Gita, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

Ibu Fatma menyatakan bahwa:

“Jalan sudah bagus, kemarin masih sedikit di aspal. Tempat parkir sudah teratur”¹⁹⁷

Kemudian Bapak Zul menambahkan:

“Fasilitasnya sudah bagus, kolamnya juga sudah besar”¹⁹⁸

Bapak Ahmad menambahkan:

“Sudah banyak penjual sama tempat istirahat orang datang.”¹⁹⁹

Lalu, Ibu Irma menyatakan:

“kami sudah punya pendapatan dari ba jual.”²⁰⁰

Kemudian Saudara Helmi Menambahkan:

“Bionga sudah ta tata dengan bagus kolam sudah besar, sudah banyak gazebo sama penjual ada wc jadinya sudah bagus.”²⁰¹

Saudari Nelam menyatakan:

“Fasilitasnya sudah banyak, apa masyarakat sudah bersemangat terus ba kasih bagus fasilitas apa rame terus yang datang”²⁰²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, kemajuan bisa dilihat dari beberapa aspek seperti peningkatan fasilitas yaitu kolam, wc, gazebo dan warung makan serta tempat parkir yang teratur. Peningkatan terhadap infrastuktur seperti perbaikan akses jalan ke tempat wisata. Serta pengunjung semakin banyak menunjukkan daya tarik wisata semakin meningkat. Dan pertumbuhan ekonomi

¹⁹⁷ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

¹⁹⁸ Zul, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

¹⁹⁹ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

²⁰⁰ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

²⁰¹ Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

²⁰² Nelam, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 6 Maret 2025

lokal yang semakin terlihat dengan banyak masyarakat berkontribusi berjualan di sekitar wisata.

Kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat di Desa Kaleke telah menghasilkan hasil menengah seperti peningkatan infrastruktur, fasilitas, daya tarik wisata dan kontribusi masyarakat. Namun, kerjasama ini masih memerlukan penguatan dalam aspek keterlibatan, koordinasi dan perencanaan yang lebih baik untuk memastikan keberlanjutan kerjasama.

C. Kelebihan dan Kekurangan dalam Program Kerjasama Ekonomi Antara BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Desa Kaleke Kab. Sigi

Program kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke memiliki kelebihan dan kekurangan. Kerjasama antara berbagai pihak ini menciptakan kerjasama mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, khususnya permandian Bionga.

1. Kelebihan Program Kerjasama Ekonomi

a. Pemberdayaan masyarakat

Kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat merasakan langsung manfaat ekonomi, baik dari penyediaan fasilitas maupun produk lokal. Selain itu, masyarakat memiliki peran aktif dalam meningkatkan layanan wisata yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan. Seperti masyarakat yang memiliki tanah di sekitar Permandian Bionga di berdayakan dengan menyediakan fasilitas seperti gazebo, warung makan dan wc untuk pengunjung yang datang.

b. Peningkatan fasilitas dan layanan wisata

Program peningkatan fasilitas dan layanan wisata menunjukkan upaya nyata untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Hal ini, akan memberikan daya tarik wisata untuk datang ke permandian Bionga.

c. Peningkatan daya tarik wisata

Kerjasama dalam promosi wisata melalui media sosial dan kegiatan berbasis komunitas, mampu menarik minat pengunjung. Selain itu, juga memperkuat hubungan sosial di masyarakat.

d. Pelestarian budaya lokal

Melalui kerjasama penyediaan paket wisata, produk-produk lokal seperti Nelam Ayu *Skincare* yang berbahan alami dan kerajinan tangan di perkenalkan kepada pengunjung. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga melestarikan budaya lokal.

2. Kekurangan Program Kerjasama Ekonomi

a. Ketergantungan terhadap BUMDes dalam pendanaan

Meskipun BUMDes pemodal utama, tapi ketergantungan terhadap BUMDes dapat menjadi masalah jika modal terbatas. Jika modal mengalami kekurangan modal maka tidak bisa mendanai kebutuhan dan operasional terhambat.

b. Peran BUMDes yang belum optimal dalam promosi wisata

Meskipun BUMDes sudah berperan dalam pendanaan dan pengelolaan aset mereka belum terlibat dalam promosi wisata. Hal ini mengurangi potensi

maksimal dari program promosi yang dapat dilakukan. Jika BUMDes lebih aktif maka program pariwisata dapat lebih berkembang.

c. Keterbatasan sumber daya manusia

Pokdarwis berperan dalam mengelola tempat wisata, namun terbatas sumber daya manusia yang terlatih yang memiliki manajemen dalam pengelolaan destinasi wisata. Diperlukan adanya pelatihan untuk peningkatan pengetahuan sumber daya manusia.

d. Potensi ketegangan pada pembebasan lahan

Pembebasan lahan untuk pengembangan destinasi wisata di sekitar permandian Bionga melibatkan kerjasama antara BUMDes dan masyarakat, yang berpotensi memberikan ketegangan. Proses negosiasi yang dilakukan, harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan.

e. Pengelolaan yang belum optimal

Pengelolaan tempat wisata belum terstruktur dengan baik, belum pencatatan pengunjung dan belum terkelola dengan baik uang hasil parkir. Serta, belum ada pembatasan untuk jumlah pengunjung yang bisa mandi di kolam. Oleh karena itu, terjadi kelebihan kapasitas di area kolam.

f. Tidak ada fasilitas ibadah

Tidak ada menyediakan fasilitas ibadah dalam kerjasama penyediaan fasilitas di permandian bionga. Hal ini, mengurangi kenyamanan dari pengunjung yang ingin beribadah ketika di Permandian Bionga.

D. Bentuk Kerjasama Ekonomi Antara BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Desa Kaleke Kab. Sigi Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Al-Qur'an mengajarkan pentingnya saling membantu dalam melakukan perbuatan baik. Konsep ini juga terlihat dalam dunia bisnis, di mana kerjasama yang saling menguntungkan menjadi bagian dari prinsip tolong-menolong. Setiap pihak yang terlibat diharapkan dapat memperoleh keuntungan, sambil memberikan manfaat dan keuntungan kepada pihak lainnya.²⁰³ Seperti pada prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam yaitu:

1. Keadilan

Dalam Al-Qur'an, keadilan memiliki pengertian yang berbeda-beda baik kata atau istilah yang saling bersangkutan paut. Kata yang digunakan untuk memperlihatkan sisi keadilan bukan hanya kata 'adl tetapi kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan dalam Al-Qur'an sebagai pengertian keadilan.²⁰⁴

Keadilan merupakan hal penting dalam ekonomi Islam, yang menekankan pada keseimbangan antara spiritual dan material dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan keadilan adalah prinsip yang harus di terapkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan harmonis.²⁰⁵ Adapun firman Allah swt tentang keadilan yaitu Q.S An-Nahl / 16: 90.

²⁰³ Abdullah Arif Mukhlas. "Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 3.

²⁰⁴ Zulkarnain Lubis, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Spektra* 3, no. 2 (2021): 5.

²⁰⁵ Sufi Indrayani dan Mawardi, "Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah (Q.S Al-Baqarah: 275-281)," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): 73.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Dalam kerjasama ekonomi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke mencerminkan prinsip keadilan melalui pembagian manfaat ekonomi kepada berbagai pihak yang terlibat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Fahmi melalui wawancara yang peneliti lakukan, bahwa:

“BUMDes itu kan pemodal utama di permandian Bionga, belum lama ini Pokdarwis ba ajukan pinjaman dana untuk pembangunan Gazebo. Terus, saat ini BUMDes masih melakukan pembebasan lahan dan ba atur kontrak sama masyarakat pemilik lahan apakah tanahnya dijual atau disewakan.”²⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, BUMDes menjalankan prinsip keadilan dengan menyediakan fasilitas bagi pengunjung sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke bahwa:

“Tanahku pas di depan kolam jadi saya pikir saya bikin gazebo sama wc saja, karena waktu bionga masih baru itu belum ada tempat untuk pengunjung. Jadi saya bikin gazebo sama wc untuk sewakan untuk orang yang datang”.²⁰⁷

Sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ahmad, Ibu Fatma juga mengatakan bahwa:

“Tanahku kan ada di dekat kolam pas di sampingnya, jadi kemarin itu

²⁰⁶ Fahmi, Direktur BUMDes Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 25 Februari 2025.

²⁰⁷ Ahmad, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

pemerintah desa minta untuk dijadikan tempat parkir. Jadi tanahku saya bikin jadi tempat parkir sama tempat jual makanan”.²⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, masyarakat menyediakan fasilitas tambahan seperti gazebo, wc, tempat parkir dan area berjualan makanan dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Hal ini, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memenuhi kebutuhan pengunjung.

2. Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang berarti suatu benda yang sifatnya tembus pandang sehingga obyek yang ada di balik benda memiliki sifat transparan akan terlihat jelas dan jernih.²⁰⁹ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi merupakan keterbukaan untuk mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan.²¹⁰

Transparansi merupakan salah satu syarat kerjasama, dengan adanya transparansi hal itu akan mengikis persengketaan dan kecurigaan sehingga kerjasama dapat berjalan jangka panjang dan saling menguntungkan. Islam menjunjung tinggi kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk pada kerjasama bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan dan mengesampingkan kezaliman.²¹¹ Prinsip transparansi dalam Islam berdasarkan firman Allah pada Q.S Al-Anfal / 8: 58.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

²⁰⁸ Fatma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

²⁰⁹ Dian Purna Anugerah Yuniarti, “Implementasi Prinsip Transparansi Melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 Pada Industri Ekstraktif”, *Yuridika* 25, no. 1 (2010): 29.

²¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 260.

²¹¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 242.

Terjemahnya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.²¹²

Transparansi dalam kerjasama ini terlihat dari adanya komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada saat negosiasi lahan dilakukan secara transparan dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menjual atau menyewakan lahannya. Selain itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Pokdarwis melalui wawancara yang peneliti lakukan bahwa:

“Pokdarwis itu ba jaga di sekitar bionga, biasanya kami itu ba bersihkan kolam atau sampah yang ada di sekitar bionga. Kami juga pasti ba perhatikan kaya kebersihan sama kelayakan gazebo den wc, kami ba cek terus itu. Kalau ada pengunjung kami pasti ba tawarkan mau ke gazebo atau sewa tikar jadi kami arahkan sesuai maunya pengunjung. Kalau promosi kami itu pakai *Instagram*, *facebook* dan sosial media yang lain, disitu kami ba bagikan cuplikan video keadaan di Bionga, foto-foto, dan ba kasih info kalau Bionga tutup dan informasi yang lain. Terus, kami juga buat kegiatan untuk promosi wisata kaya Bionga Festival Musik, jalan sehat sama lomba-lomba 17an.”²¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, Pokdarwis rutin melaporkan pemeliharaan fasilitas yang ada di tempat wisata. serta, promosi wisata yang memanfaatkan media sosial menunjukkan transparansi dalam memberikan informasi kepada publik. Dan membuat kegiatan berbasis komunitas, untuk memperkuat partisipasi dari masyarakat sekaligus menciptakan daya tarik wisata.

3. Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah suatu kewajiban untuk menyelesaikan atau melakukan tugas yang harus di penuhi, memiliki konsekuensi kegagalan, dan

²¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya,” Situs Resmi KEMENAG. <https://quranindonesia.kemenag.go.id>. (7 Juni 2025).

²¹³ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025

mengerjakan tugas sebaik mungkin. Bila terjadi kesalahan pada tugas yang di emban, tidak menyalahkan orang lain serta fokus untuk memberikan hasil yang maksimal dengan menekankan sikap positif. Dan tanggungjawab juga merupakan kesadaran seseorang untuk menyelesaikan tugasnya dalam hal apapun.²¹⁴

Tanggungjawab dalam ekonomi syariah memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Tanggungjawab ini mencakup kewajiban menjaga kesejahteraan, bermanfaat dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.²¹⁵ Berdasarkan firman Allah pada Q.S Al-Muddassir / 29: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya: Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.²¹⁶

Tanggungjawab dalam kerjasama ekonomi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke terlihat dari pembagian peran masing-masing pihak. BUMDes memiliki tanggungjawab atas pembiayaan dan pengelolaan aset desa, termasuk pada pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas. Pokdarwis yang berperan sebagai pengelola utama yang memastikan kebersihan dan kelayakan fasilitas, seperti yang disampaikan oleh Ketua Pokdarwis melalui wawancara yang peneliti lakukan, yaitu:

“Kami pasti ba pasangan papan peringatan, ba taro tong sampah, pokoknya

²¹⁴ Miramur Permata Sari, Fitriah Hayati, dan Fitriani, “Analisis Upaya Guru Dalam Menanamkan Karakter Tanggungjawab Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Khairani Aceh Besar.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2022): 3-4.

²¹⁵ Maulena, Teuku Zulkarnain, dan Mariana, “Transformasi Bisnis Dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan Dan Tanggungjawab Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 7, no. 2 (2024): 3.

²¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya,” Situs Resmi KEMENAG. <https://quranindonesia.kemenag.go.id>. (7 Juni 2025).

ba pelihara Bionga.”²¹⁷

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kaleke,

Saudara Helmi mengatakan bahwa:

“Saya ba sewakan ban sama tikar untuk orang datang, karena biasa orang datang lupa bawa tikar baru gazebo so full jadi saya ba sewakan tikar. Terus kalau mau mandi biasanya ban itu diperlukan apalagi kalau mau santai di atas air”.²¹⁸

Ibu Irma menambahkan:

“Saya ba jual makanan, ada mie, binte, jagung, minuman juga ada. Supaya pengunjung tidak usah jauh beli makanan sudah ada di bionga. Terus, pas ada bionga saya sudah punya uang sendiri bisa ba bantu untuk uang sekolahnya anakku sama uang untuk dapur.”²¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, masyarakat juga menunjukkan tanggungjawabnya dengan menyediakan fasilitas tambahan dan kebutuhan wisataaan serta berpartisipasi dalam kegiatan operasional.

²¹⁷ Muhammad Syahid, Ketua Pokdarwis Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 27 Februari 2025

²¹⁸ Helmi, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

²¹⁹ Irma, Masyarakat Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kaleke, 28 Februari 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk program kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke merupakan kerjasama multi-pihak. Kerjasama ini menggabungkan kekuatan finansial, keterampilan operasional dan kontribusi masyarakat untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. BUMDes berperan sebagai penyedia dana, Pokdarwis bertanggungjawab atas pengelolaan operasional dan masyarakat turut berkontribusi melalui penyediaan fasilitas serta aktivitas ekonomi.
2. Program kerjasama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat memiliki adanya pemberdayaan masyarakat, peningkatan fasilitas dan layanan wisata, serta pelestarian budaya lokal. Dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sementara itu, kekurangannya seperti ketergantungan terhadap BUMDes dalam hal pendanaan, peran promosi wisata yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, potensi ketegangan dalam pembebasan lahan, pengelolaan yang belum optimal dan kurangnya fasilitas ibadah.
3. Kerjasama ekonomi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke mencerminkan prinsip ekonomi Islam yaitu keadilan, transparansi dan tanggungjawab. Keadilan terlihat dari pembagian manfaat yang merata,

transparansi melalui negosiasi terbuka dan promosi, dan tanggungjawab melalui pembagian peran yang jelas.

B. Saran

1. Saran untuk pemerintah Desa Kaleke

Memberikan pelatihan terkait pengelolaan usaha dan pariwisata kepada BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat serta melakukan inovasi dalam pengembangan paket wisata. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal, seperti pelaku usaha pariwisata, lembaga keuangan atau organisasi non pemerintahan untuk memperkuat kapasitas operasional. Membuat program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Membuat pelatihan keterampilan dibidang pemandu wisata, kebersihan, dan keramahan untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih profesional. Membuat prosedur pelaksanaan kerjasama dan membangun fasilitas ibadah di tempat wisata.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya:

Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari pengembangan destinasi wisata di desa kaleke.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Moh. "Permandian Wisata Bionga Palu : Keindahan Alam Yang Menyegarkan." *RRI*. 12 Januari 2024. <https://www.rri.co.id/palu/wisata/513495/permandian-wisata-bionga-palu-keindahan-alam-yang-menyegarkan>. (8 Juni 2025).
- Arikunto, s. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asmoro, Bramantyo Tri dan Muh Mujib Da'awi. "Revitalisasi kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Desa Sukodono dalam pengelolaan obyek wisata coban pandawa." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 5, no. 1 (2020).
- Astutu, Retno Sunu, Hardi Warsono dan Abd. Rachim. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Fhatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Freeman, R. Edward. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman, 1984.
- Hajiji, Muhammad. "Pemkab Sigi Pacu Pengembangan Pariwisata Tingkatkan Ekonomi Rakyat." *AntaraneWS*. 6 Juli 2023. <https://www.antaraneWS.com/berita/3622365/pemkab-sigi-pacu-pengembangan-pariwisata-tingkatkan-ekonomi-rakyat>. (5 Januari 2025).
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hidayat, Muh Ryan Rahmatul. "Potensi Pariwisata Sebagai Lokomotif Perekonomian Di Kabupaten Demak". *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik* 11, no. 1 (2024).
- Imron. "Ingin Coba Berenang Di Kolam Mata Air? Permandian Bionga Ini Wajib Kamu Kunjungi." *Soal Palu*. 28 Februari 2023. <https://soalpalu.com/2023/02/28/ingin-coba-berenang-di-kolam-mata-air-permandian-bionga-ini-wajib-kamu-kunjungi/>. (8 Juni 2025).
- Indrayani, Sufi dan Mawardi. "Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah (Q.S Al-Baqarah: 275-281)," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025).

- Izmi, Dyas Syahlia dan Ananta Prathama. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis BUMDes". *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 3 (2023).
- Jadesta. "Desa Wisata Kampung Merah Putih Desa Kaleke Kec. Dolo Barat Kab. Sigi." https://sulteng.jadesta.com/desa/kampung_merah_putih. (5 Januari 2025)
- Jadesta. "Sulawesi Tengah". <https://sulteng.jadesta.com/>. (5 Januari 2025).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," *Situs Resmi KEMENAG*. <https://quranindonesia.kemenag.go.id>. (7 Juni 2025).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an dan Terjemahnya." *Situs Resmi KEMENAG*. <http://quranindonesia.kemenag.go.id>. (5 Januari 2025).
- Lubis, Zulkarnain Lubis. "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Spektra* 3, no. 2 (2021).
- Maulena, Teuku Zulkarnain, dan Mariana. "Transformasi Bisnis Dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan Dan Tanggungjawab Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 7, no. 2 (2024).
- Maulia, Erica Indah dan Budi Setiyono. "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggan: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata". *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 1 (2024).
- Muhakir, Haqir. "Permandian Bionga, Wisata Kolam Renang Terjangkau di Sigi." *Tribunnews*. 6 Juni 2021. <https://palu.tribunnews.com/2021/06/06/permandian-bionga-wisata-kolam-renang-terjangkau-di-sigi>. (8 Juni 2025).
- Muid, Abdul, Ahmad Syifa'ul Fatoni, Fadhilatun Nadifah dan Muhammad Rondi. "Makna Keberadaan Alam (Dunia) Tafsir Surah Al-Baqarah, 2: 29 Dan Al-Araf 7:54." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam* 13, no. 13 (2020).
- Nasrullah, et al. *Perencanaan Destinasi Pariwisata*. Yayasan Kita Menulis, 2023.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet: VIII; Bandung : Bumi Aksara, 2006.
- Panjaitan, Mayolita, R. Hamdani Harahap dan Hadriana Marhaeni Munthe. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Desa Kuta Jungk Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara." *PERSPEKTIF* 12, no. 1 (2023).

- Peraturan Desa Kaleke Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa SIGAMPA SEJAHTERA.
- Peraturan Desa Kaleke *tentang Sistem Pemeliharaan dan Pengelolaan Mata Air Desa Kaleke* Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 *Tentang Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.
- Pratiwi, Yunisti. "Identifikasi 4A (Attraction, Amenity, Accessibility dan Ancillary) dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Pantai Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung." *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* 3, No. 2 (2023).
- Purwitasari, Eka. "Hukum Menjual Air." *Rumah Zakat*. 27 Juli 2023. <https://www.rumahzakat.org/hukum-menjual-air>. (11 Juni 2025).
- Putro, Heru Purboyo Hidayat dan Alhidal Furqan. *Pengembangan Kota Berbasis Pariwisata Pusaka Berkelanjutan*. Bali : Intelektual Manifes Media, 2024. 11-12.
- Rasyid, Fathor. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Kediri: IAIN Kediri Press, 2022.
- Runtukahu, Job. "Sektor Pariwisata Sulteng Penunjang Utama Pembangunan." *Radio Republik Indonesia (RRI)*. 18 Maret 2023. <https://www.rri.co.id/wisata/191531/sektor-pariwisata-sulteng-penunjang-utama-pembangunan>. (5 Januari 2025).
- Sabaruddin, Abdul, Maulid, Taslim Fait, dan Maharani. "Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Alam Kea-Kea Mangolo di Kabupaten Kolaka." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, No. 2 (2023). 173-174.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Salsabila, Isna dan Ardiana Yuli Pupitasari. "Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dalam Pengembangan Desa Wisata." *Jurnal Kajian Ruang* 3, no. 2 (2023).
- Salsabila, Shinta Nuria dkk. "Strategi Inovatif Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Industri Pariwisata di Bangkalan." *Jurnal Bintang Manajemen* 2, no. 1 (2024).

- Saputra, Made Adhitya dan Irwansyah Kamindang. "Kapasitas Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Desa Wisata Kampung Merah Putih Di Desa Kaleke, Kabupaten Sigi." *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 1, no. 9 (2024). 528-529.
- Sari, Miramur Permata, Fitriah Hayati, dan Fitriani. "Analisis Upaya Guru Dalam Menanamkan Karakter Tanggungjawab Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Khairani Aceh Besar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2022). 3-4.
- Satori, Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009.
- Setiawan, Aby. "Peran POKDARWIS dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Biru Kersik Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Administrasi Bisnis FISIPOL UNMUL* 10, no. 3 (2022).
- Siswanda, Kokok Putra dan Meirinawati. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Mengembangkan Wisata Embung Di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan." *Publika* 9, no. 3 (2021). 324-325.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- TafsirQ, "Tafsir Quraish Shihab", <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90#tafsir-quraish-shihab>. (7 Juni 2025).
- TafsirQ, "Tafsir Quraish Shihab", <https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-58>. (7 Juni 2025).
- Tindangen, Megi. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020).
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yuniarti, Dian Purna Anugerah. "Implementasi Prinsip Transparansi Melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 Pada Industri Ekstraktif". *Yuridika* 25, no. 1 (2010).

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara untuk BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat

Untuk Skripsi yang Berjudul

Analisis Kerjasama Ekonomi Antara Bumdes, Pokdarwis Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi

Nama : Fahmi

Jabatan : Direktur BUMDes

PERTANYAAN

1. Bagaimana bentuk kerja sama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

BUMDes itu kan pemodal utama di permandian Bionga, belum lama ini Pokdarwis ba ajukan pinjaman dana untuk pembangunan Gazebo. Terus, saat ini BUMDes masih melakukan pembebasan lahan dan ba atur kontrak sama masyarakat pemilik lahan apakah tanahnya dijual atau disewakan

2. Bagaimana peran masing-masing pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam program kerja sama ini?

Jawaban:

Kami kasih uang ke Pokdarwis untuk pemeliharaan dan biaya pengelolaan di Bionga. Terus kami juga membantu pembebasan lahan dengan masyarakat, ada yang mau tanahnya di sewa ada jual yang dijual

3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam menjalankan program tersebut?

Jawaban:

Kalau koordinasi biasa dilakukan pada saat rapat biasanya. Untuk membahas perencanaan dan banyak hal biasa di rapat itu.

4. Apa kelebihan dari kerja sama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata ini?

Jawaban:

Kalau kelebihannya itu jadi lebih baik itu bionga, jadinya sudah banyak masyarakat yang berpartisipasi dan sudah banyak tersedia fasilitas.

5. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan kerja sama ini, baik dari pihak BUMDes, Pokdarwis, maupun masyarakat?

Jawaban:

Tantangannya itu belum semua masyarakat paham mengenai potensi wisata yang ada di desa.

6. Apakah ada perbedaan dalam persepsi atau harapan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama ini? Bagaimana hal itu mempengaruhi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Tentu saja ada karena berhubung belum ada prosedur operasional yang mengatur kerjasama ini.

7. Apakah kerjasama ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Kaleke?

Jawaban:

Sudah ba kasih manfaat kerjasama ini, karena hasil penjualan air bersih sudah menjadi PAD yang sudah membantu masyarakat sekitar.

8. Bagaimana kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Dengan saling melengkapi tentunya, kan tujuan dari bekerjasama ini supaya bisa saling menutupi lah kekuarangan masing-masing melalui sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak.

9. Bagaimana potensi sumber daya alam di Desa Kaleke dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan?

Jawaban:

Tentunya dimanfaatkan seperti di jaga, di promosikan dan dikelola dengan baik itu potensi wisata.

10. Apa saja indikator keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kalau itu sih dari kompaknya berbagai pihak saling bekerjasama

11. Bagaimana partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dalam mencapai tujuan pengembangan wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kalau partisipasi masyarakat sih kaya membangun fasilitas-fasilitas di tanahnya dan memerdulikan kebutuhan pengunjung. Kalau pemerintah desa yah ini kami sebagai bisa di bilang mewakili.

12. Bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh setiap pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kekuatannya BUMDes itu punya dana yang bisa bantu pengembangan destinasi wisata, dengan ba kasih modal dan perbaiki infrastruktur yang ada di Bionga.

13. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mendukung kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

BUMDes itukan penggerak ekonomi di desa. Jadi, kami itu mendukung pengembangan destinasi dengan memberikan modal untuk fasilitas di Bionga atau pembebasan lahan.

14. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pihak cukup untuk mendukung kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kami kan lembaga yang mengatur perekonomian di Desa, kalau untuk sekarang kami masih terus belajar untuk pengelolaan dana di bidang pariwisata.

15. Sejauh mana BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat terlibat dalam setiap proses kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kami tentunya terlibat terus kalau ada rencana sama pelaksanaan pengembangan, karena kembali lagi perannya kami itu kan ba biayai maka kami terlibat terus.

16. Bagaimana pembentukan forum komunikasi antar pihak dapat meningkatkan kolaborasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Pembentukan *forum* itu memang penting sekali, di dalam *forum* kita bisa saling tukar pendapat untuk pengembangan yang dilakukan sekarang. Kalau tempat pertemuan itu biasanya balai desa sama gedung serbaguna.

17. Apakah prosedur pelaksanaan kolaborasi sudah jelas dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Prosedur pelaksanaan dalam kerjasama ini belum ada, paling kami jalan cuman kaya dari hasil-hasil rapat saja. Ini sih yang masih perlu untuk di bikin, sebenarnya kerjasama ini belum ada acuannya jadi masih berjalan begitu saja.

18. Apakah proses kolaborasi dilakukan secara transparan sehingga semua pihak dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang diambil?

Jawaban:

Belum semuanya transparan, karena kembali lagi tadi kalau prosedur itu belum ada. Tapi kalau dari kami BUMDes kalau pelaporan pendapatan di rapat, semua yang ikut kerjasama pasti ada disitu. Disitu kami melaporkan hasil penjualan air bersih yang kami terima dari Pokdarwis, yang pendapatannya itu sekarang alhamdulillah sudah jadi PAD terus kami kelola untuk kebutuhan masyarakat Kaleke.

19. Bagaimana kepuasan pemangku kepentingan terhadap pemimpin dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Pemimpin dalam kerjasama ini kan kepala Desa, beliau sangat mendukung adanya pengembangan makanya kami selaku BUMDes ikut dalam kerjasama ini.

20. Sejauh mana kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik yang muncul antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Kalau ba selesaikan adanya perbedaan pendapat sejauh ini masih bisa di tangani. Tapi kalau ada konflik yang lebih besar kayanya susah apa belum ada prosedur pelaksanaannya.

21. Apakah jumlah kesepakatan yang tercapai mencerminkan keberhasilan pemimpin dalam memfasilitasi keputusan yang diterima bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kalau dilihat dari kesepakatan yang sudah tercapai, tidak bisa juga di bilang berhasil tapi kalau dilihat kepala Desa memang ba dukung sekali pengembangan destinasi wisata. Tapi, kesepakatan itu biasa hanya dari sebagian pihak saja jadi saya rasa berhasilnya pemimpin itu tidak hanya dari jumlahnya tapi dari kesepakatan semua pihak.

22. Seberapa sering pertukaran pendapat terjadi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam proses pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Rapat ada setiap bulan kalau untuk ba bahas wisata, tapi kalau ada masalah atau hal penting untuk di bahas biasa rapat bisa lebih dari satu kali dalam satu bulan. Tapi ini masalahnya, kalau rapat cuman sedikit yang datang.

23. Pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata membangun kepercayaan satu sama lain untuk mendukung keberhasilan kolaborasi?

Jawaban:

yang terlibat di kerjasama ini ada Pemerintah Desa yang mempercayakan sama kami, Pokdarwis sama masyarakat. Supaya orang percaya sama BUMDes kami kasih laporan pendapatan setiap rapat. Tapi kami masih berusaha supaya masyarakat bisa terlibat semua.

24. Sejauh mana setiap pihak berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

BUMDes pasti punya komitmen yang tinggi, terutama di pengelolaan keuangan. Tapi masalahnya komitmennya masyarakat masih kurang mungkin karena dorang rasa kurang dilibatkan.

25. Apakah semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, harapan, serta tantangan yang ada dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Saya rasa mungkin karena belum ada prosedur yang jelas jadi belum sepemahaman. Masyarakat hanya fokus ke manfaatnya secara langsung, jadi saya rasa itu tantangannya saat ini.

26. Sejauh mana kolaborasi yang telah dilakukan menghasilkan kemajuan atau pencapaian yang nyata dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Sudah ada sedikit kemajuan kaya kolam sudah lebih besar, terus fasilitas lebih banyak. Tapi masih belum maksimal itu, karena belum semua terlibat di pengambilan keputusan.

Pedoman Wawancara untuk BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat

Untuk Skripsi yang Berjudul

Analisis Kerjasama Ekonomi Antara Bumdes, Pokdarwis Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi

Nama : Muhammad Syahid

Jabatan : Ketua Pokdarwis

PERTANYAAN

1. Bagaimana bentuk kerja sama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Pokdarwis itu ba jaga di sekitar bionga, biasanya kami itu ba bersihkan kolam atau sampah yang ada di sekitar bionga. Kami juga pasti ba perhatikan kaya kebersihan sama kelayakan gazebo den wc, kami ba cek terus itu. Kalau ada pengunjung kami pasti ba tawarkan mau ke gazebo atau sewa tikar jadi kami arahkan sesuai maunya pengunjung. “Kami itu pakai *Instagram, facebook* dan sosial media yang lain untuk promosi wisata, disitu kami ba bagikan cuplikan video keadaan di Bionga, foto-foto, dan ba kasih info kalau Bionga tutup dan informasi yang lain. Terus, kami juga buat kegiatan untuk promosi wisata kaya Bionga Festival Musik, jalan sehat sama lomba-lomba 17an.

2. Bagaimana peran masing-masing pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam program kerja sama ini?

Jawaban:

Pokdarwis ini ada karena adanya Bionga ini, terus berdasarkan perkades kami itu ditunjuk untuk mengelola mata air Bionga. Kami pasti ba pasangan papan peringatan, ba taro tong sampah, pokoknya ba pelihara Bionga. Kalau kami biasa ba bersihkan kolam, pasti masyarakat terkhusus penjual-penjual di Bionga dorang itu pasti ba kumpul uang untuk beli snack sama air minum untuk kami yang kerja.

3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam menjalankan program tersebut?

Jawaban:

Kalau mekanisme koordinasi itu biasa pada saat rapat, disitu membahas semua perencanaan dan hal tentang pengembangan.

4. Apa kelebihan dari kerja sama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata ini?

Jawaban:

Kalau kelebihannya, bionga jadi lebih tertata dan fasilitas jadi lebih banyak.

5. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan kerja sama ini, baik dari pihak BUMDes, Pokdarwis, maupun masyarakat?

Jawaban:

Kalau tantangannya itu dari sumber daya yang terbatas yang tau manajemen pengelolaan destinasi.

6. Apakah ada perbedaan dalam persepsi atau harapan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama ini? Bagaimana hal itu mempengaruhi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Tentunya masih ada, dan hal itu sangat mempengaruhi pengembangan karena belum ada prosedur yang jelas mengatur kerjasama ini.

7. Apakah kerjasama ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Kaleke?

Jawaban:

Sangat memberikan manfaat karena dari adanya kerjasama ini sudah ada masyarakat yang terbantu dengan mendapatkan penghasilan di tempat wisata.

8. Bagaimana kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Sangat mengatasi keterbatasan sumber daya, karena BUMDes itu sudah dipenuhi kekurangan sumber daya keuangan di pengelolaan wisata.

9. Bagaimana potensi sumber daya alam di Desa Kaleke dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan?

Jawaban:

Kalau dari kami pokdarwis tentunya menjaga dan melestarikan potensi wisata yang ada.

10. Apa saja indikator keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kesadaran akan potensi wisata yang dimiliki.

11. Bagaimana partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dalam mencapai tujuan pengembangan wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Masyarakat sebagian sudah sangat berpartisipasi dalam pengembangan destinasi wisata, kalau pemerintah desa tentunya sangat berpartisipasi makanya ada kami di bentuk.

12. Bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh setiap pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Pokdarwis itu kan ditunjuk jadi pengelola, jadinya kami bertemu langsung dengan pengunjung. Terus kami ba jaga tiap hari, Kami yang punya tanggungjawab untuk semua yang ada di Bionga kaya kebersihan dan keluhan-keluhan dari pengunjung. Terus kami juga ba update tiap hari keadaan bionga di instagram.

13. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mendukung kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kami kan punya tanggungjawab untuk ba kelola bionga, jadi kami tiap hari ada di Bionga ba arahkan orang datang dan ba jaga kebersihan.

14. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pihak cukup untuk mendukung kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Pokdarwis sudah punya sedikit pengetahuan tentang pengelolaan tempat wisata, tapi masih butuh pelatihan lagi.

15. Sejauh mana BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat terlibat dalam setiap proses kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Pokdarwis sudah pasti terlibat karena kan itu tanggungjawabnya kami untuk pengembangan destinasi wisata.

16. Bagaimana pembentukan forum komunikasi antar pihak dapat meningkatkan kolaborasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Pembentukan *forum* itu sudah ada, biasanya rapat itu di adakan kalau bukan balai desa pasti di gedung serbaguna. *Forum* itu penting untuk jalannya kerjasama, karena kan itu jadi ruang interaksi.

17. Apakah prosedur pelaksanaan kolaborasi sudah jelas dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Belum ada prosedurnya kerjasama ini, jalannya kerjasama ini hanya dari keputusan rapat biasa. Jadi kami ba jalankannya itu sesuai kesepakatan saja. Kalau untuk kaya pedoman resmi begitu belum ada.

18. Apakah proses kolaborasi dilakukan secara transparan sehingga semua pihak dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang diambil?

Jawaban:

Kalau untuk transparasi mungkin belum semua, tapi kalau untuk perencanaan itu ada diskusi di dalam *forum*. Makanya kerjasama ini belum terlalu transparan karena prosedur itu belum ada disusun.

19. Bagaimana kepuasan pemangku kepentingan terhadap pemimpin dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya rasa dengan dibentuknya Pokdarwis karena ada potensi wisata itu sudah bisa dilihat kalau pemimpin aktif terhadap potensi-potensi yang ada di Desa. Tapi perlu di buat pedoman untuk kerjasama ini biar lebih tertata.

20. Sejauh mana kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik yang muncul antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Pemimpin sudah ba kelola konflik dengan baik, tapi permasalahan itu cuman ta ulang-ulang terus. Karena tidak prosedur yang jelas ba atur kerjasama.

21. Apakah jumlah kesepakatan yang tercapai mencerminkan keberhasilan pemimpin dalam memfasilitasi keputusan yang diterima bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Menurutku ada kesepakatan bukan dari semua pihak tapi hanya sebagian, sama ada kesepakatan yang hanya dibicarakan begitu saja.

22. Seberapa sering pertukaran pendapat terjadi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam proses pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Kami kalau diskusi itu lebih sering sama BUMDes, kalau ke masyarakat biasa hanya di rapat saja. Kalau sama BUMDes biasa bicara tidak formal cuman duduk-duduk biasa saja.

23. Pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata membangun kepercayaan satu sama lain untuk mendukung keberhasilan kolaborasi?

Jawaban:

Pihak yang terlibat itu sudah pasti Pokdarwis, ada juga BUMDes, sama masyarakat. Kami paling ba laporkan hasil penjualan air bersih sama BUMDes, terus ba kelola Bionga dengan baik.

24. Sejauh mana setiap pihak berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Pokdarwis berkomitmen sekali, tapi komitmen semua pihak perlu sama supaya tujuannya kerjasama ini bisa tercapai.

25. Apakah semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, harapan, serta tantangan yang ada dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Belum satu paham, karena kami biasa fokus ke daya tarik wisata tapi BUMDes cuman fokus ke finansial. Baru masyarakat fokus di manfaat yang didapat saja.

26. Sejauh mana kolaborasi yang telah dilakukan menghasilkan kemajuan atau pencapaian yang nyata dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kemajuan ada dari pengunjung, kolam juga sudah besar, penjual sudah banyak.

Pedoman Wawancara untuk BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat

Untuk Skripsi yang Berjudul

Analisis Kerjasama Ekonomi Antara Bumdes, Pokdarwis Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi

Nama : Gita

Jabatan : Masyarakat

PERTANYAAN

1. Bagaimana bentuk kerja sama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya selalu ikut kegiatan yang diadakan di Desa, kaya kemarin acara Bionga Festival Musik saya ikut kepanitiaan jadi *Liason Officer* (LO). Karena kan itu acara lomba band terus ada juga artis lokal palu yang di undang, tapi saya jadi LO nya band yang lomba. Terus ada juga kegiatan jalan sehat saya juga jadi panitia.

2. Bagaimana peran masing-masing pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam program kerja sama ini?

Jawaban:

Kalau masyarakat biasa berperan dalam promosi dan penyediaan fasilitas wisata.

3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam menjalankan program tersebut?

Jawaban:

Koordinasi biasa pas rapat.

4. Apa kelebihan dari kerja sama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata ini?

Jawaban:

Jadi punya pendapatan dari adanya kerjasama ini. Karena jadi lebih tertata bionga.

5. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan kerja sama ini, baik dari pihak BUMDes, Pokdarwis, maupun masyarakat?

Jawaban:

Kendalanya itu, belum semua masyarakat ikut dalam kerjasama ini.

6. Apakah ada perbedaan dalam persepsi atau harapan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama ini? Bagaimana hal itu mempengaruhi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Tentunya saja ada, karena belum ada prosedur pelaksanaan. Jadi ini sangat mempengaruhi pengembangan.

7. Apakah kerjasama ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Kaleke?

Jawaban:

Sudah karena masyarakat sudah dapat manfaat langsung dari berjualan dan menyediakan jasa di tempat wisata.

8. Bagaimana kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kalau saya ikut dalam promosi sama berjualan di tempat wisata.

9. Bagaimana potensi sumber daya alam di Desa Kaleke dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan?

Jawaban:

Dijaga sama di lestarikan. Sama dikembangkan.

10. Apa saja indikator keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kekompakan pihak-pihak yang ada di dalam kerjasama.

11. Bagaimana partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dalam mencapai tujuan pengembangan wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Masyarakat aktif menyediakan fasilitas wisata.

12. Bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh setiap pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kalau saya aktif sekali ikut kegiatan yang ada di Desa, kegiatan bionga *festival* musik waktu itu yang paling besar saya ikut.

13. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mendukung kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya ikut kegiatan promosi terus juga ba jual makanan di Bionga.

14. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pihak cukup untuk mendukung kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya bagaimana sifat-sifat masyarakat disini, apa lagi anak muda. Mereka itu kalau ada kegiatan promosi di bikin, pasti semangat sekali mo ikut. Tapi kalau untuk pengetahuan tentang pariwisata kaya masih kurang, jadi masih perlu ada pelatihan.

15. Sejauh mana BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat terlibat dalam setiap proses kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya terlibat ba jual makanan sama ikut kegiatan promosi yang di adakan.

16. Bagaimana pembentukan forum komunikasi antar pihak dapat meningkatkan kolaborasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Kalau pembentukan *forum* itu sudah ada, biasa di buat kalau bukan di balai desa pasti di gedung serbaguna. Tapi seringnya di balai desa sih.

17. Apakah prosedur pelaksanaan kolaborasi sudah jelas dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kami sebagai masyarakat juga biasa bingung, apa kerjasama ini belum ada pedomannya.

18. Apakah proses kolaborasi dilakukan secara transparan sehingga semua pihak dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang diambil?

Jawaban:

Biasa yang ada hanya pelaporan penjualan air bersih, kalau tahan pelaksanaan itu kaya belum jelas.

19. Bagaimana kepuasan pemangku kepentingan terhadap pemimpin dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Pemimpin peduli sekali sih sama pengembangan destinasi wisata, tapi masih banyak kurangnya kaya prosedur pelaksanaan belum ada. Sama belum semua masyarakat ikut aktif di dalam.

20. Sejauh mana kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik yang muncul antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Konflik yang biasanya ada itu perbedaan pendapat sih kalau di rapat, tapi kepala desa bisa jadi penengah kalau ada sudah kacau.

21. Apakah jumlah kesepakatan yang tercapai mencerminkan keberhasilan pemimpin dalam memfasilitasi keputusan yang diterima bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Menurutku, jumlah kesepakatan tidak bisa jadi ukuran kalau pemimpin itu berhasil. Karena, dari semua kesepakatan ada juga yang tidak mengerti.

22. Seberapa sering pertukaran pendapat terjadi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam proses pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Biasa kami cuman di kasih tau hasil diskusi yang sudah ada.

23. Pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata membangun kepercayaan satu sama lain untuk mendukung keberhasilan kolaborasi?

Jawaban:

Saya rasa BUMDes sama Pokdarwis saja yang terlibat sih, karena kan biasa hasil diskusinya dorang baru di lempar di *forum*.

24. Sejauh mana setiap pihak berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kalau komitmennya BUMDes sama Pokdarwis memang besar, tapi kalau masyarakat kaya masih kurang apa belum ada juga pedoman yang jelas dari kerjasama ini.

25. Apakah semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, harapan, serta tantangan yang ada dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Sarasa belum, karena kami juga masih bingung sama ini kerjasama bagaimana kelanjutannya apa belum ada prosedur dibikin.

26. Sejauh mana kolaborasi yang telah dilakukan menghasilkan kemajuan atau pencapaian yang nyata dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Fasilitas sudah lebih bagus, pengunjung juga sudah lebih banyak terus.

Pedoman Wawancara untuk BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat

Untuk Skripsi yang Berjudul

Analisis Kerjasama Ekonomi Antara Bumdes, Pokdarwis Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi

Nama : Fatma

Jabatan : Masyarakat

PERTANYAAN

1. Bagaimana bentuk kerja sama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Tanahku kan ada di dekat kolam pas di sampingnya, jadi kemarin itu pemerintah desa minta untuk dijadikan tempat parkir. Jadi tanahku saya bikin jadi tempat parkir sama tempat jual makanan.

2. Bagaimana peran masing-masing pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam program kerja sama ini?

Jawaban:

Masyarakat itu ba sediakan fasilitas tambahan.

3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam menjalankan program tersebut?

Jawaban:

Paling lewat rapat saja.

4. Apa kelebihan dari kerja sama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata ini?

Jawaban:

Kelebihannya saya sudah dapat uang sendiri.

5. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan kerja sama ini, baik dari pihak BUMDes, Pokdarwis, maupun masyarakat?

Jawaban:

Belum terarah ini kerjasama.

6. Apakah ada perbedaan dalam persepsi atau harapan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama ini? Bagaimana hal itu mempengaruhi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Tentu ada, apa belum ada peraturannya. Jadi itu bisa jadi kendala pengembangan.

7. Apakah kerjasama ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Kaleke?

Jawaban:

Iya sudah, karena saya sudah punya pendapatan sendiri.

8. Bagaimana kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Dengan ba perhatikan apa yang kurang jadi itu lagi di buat d bionga. Kaya pertama tiada yang ba jual jadi saya ba jual disana.

9. Bagaimana potensi sumber daya alam di Desa Kaleke dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan?

Jawaban:

Dimanfaatkan dengan dibuka jadi tempat permandian.

10. Apa saja indikator keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kekompakan semua orang yang kerjasama.

11. Bagaimana partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dalam mencapai tujuan pengembangan wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Masyarakat sangat berpartisipasi apa lagi ba sediakan fasilitas.

12. Bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh setiap pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya ba manfaatkan tanahku untuk tempat jual, sama parkir. Tapi yang ba jual disini bukan saya sendiri tapi banyak, tapi orang-orang disini sendiri.

13. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mendukung kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya ba kasih tanahku dijadikan tempat ba jual sama parkir, saya juga ba jual pisang goreng disini.

14. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pihak cukup untuk mendukung kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya sudah lama ba jual di Bionga, jadi saya pikir ba layani orang datang dengan ramah itu sudah bagus. Tapi kayanya perlu ada itu sosialisasi supaya ba tambah pengetahuan untuk kami ibu-ibu ini.

15. Sejauh mana BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat terlibat dalam setiap proses kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya bikin warung makan sama jadikan tempat parkir tanahku.

16. Bagaimana pembentukan forum komunikasi antar pihak dapat meningkatkan kolaborasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Tidak ada grub WA, paling kalau mau rapat di kasih undangan.

17. Apakah prosedur pelaksanaan kolaborasi sudah jelas dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kerjasama jalan cuman dari hasil rapat saja, kalau prosedur atau peraturan-peraturan begitu belum ada.

18. Apakah proses kolaborasi dilakukan secara transparan sehingga semua pihak dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang diambil?

Jawaban:

Belum terlalu transparan sih, karena kami tidak terlalu tau kerjasama ini.

19. Bagaimana kepuasan pemangku kepentingan terhadap pemimpin dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kepala Desa sekarang memang sudah bagus, jadinya lebih teratur itu Bionga.

20. Sejauh mana kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik yang muncul antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Beda pendapat yang sering, tapi kalau konflik yang lain belum. Kepala Desa biasa ba kasih penjelasan.

21. Apakah jumlah kesepakatan yang tercapai mencerminkan keberhasilan pemimpin dalam memfasilitasi keputusan yang diterima bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Mungkin belum, apa belum ta jalan semua hasil rapat atau kesepakatan.

22. Seberapa sering pertukaran pendapat terjadi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam proses pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Paling kami diskusi pas rapat saja.

23. Pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata membangun kepercayaan satu sama lain untuk mendukung keberhasilan kolaborasi?

Jawaban:

Masyarakat kan jarang dilibatkan jadi kepercayaannya kami itu cuman sedikit saja.

24. Sejauh mana setiap pihak berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

BUMDes sama Pokdarwis dorang yang utama di kerjasama ini, kalau masyarakat belum terlalu ada karena masih kurang juga kami terlibat.

25. Apakah semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, harapan, serta tantangan yang ada dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Saya harapkan semoga bionga ini ba kasih manfaat terus untuk kami, tapi saya tidak tau kalau yang lain mungkin sama juga kaya saya.

26. Sejauh mana kolaborasi yang telah dilakukan menghasilkan kemajuan atau pencapaian yang nyata dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Jalan sudah bagus, kemarin masih sedikit di aspal. Tempat parkir sudah teratur.

Pedoman Wawancara untuk BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat

Untuk Skripsi yang Berjudul

Analisis Kerjasama Ekonomi Antara Bumdes, Pokdarwis Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi

Nama : Zul

Jabatan : Masyarakat

PERTANYAAN

1. Bagaimana bentuk kerja sama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kerjasamaku itu ba jual kerajinan tangan, kerajinan tangan yang saya bikin itu ada banyak, ada pajangan tradisional yang dari kayu ada juga yang dari tempurung kelapa.

2. Bagaimana peran masing-masing pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam program kerja sama ini?

Jawaban:

Kalau berperan ikut ba sediakan paket wisata.

3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam menjalankan program tersebut?

Jawaban:

Biasa melalui rapat

4. Apa kelebihan dari kerja sama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata ini?

Jawaban:

Produk jadi lebih luas pasarnya.

5. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan kerja sama ini, baik dari pihak BUMDes, Pokdarwis, maupun masyarakat?

Jawaban:

Kendalanya itu masyarakat belum semua paham tentang potensi yang di punya.

6. Apakah ada perbedaan dalam persepsi atau harapan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama ini? Bagaimana hal itu mempengaruhi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Ada karena belum semua paham sama kerjasama ini.

7. Apakah kerjasama ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Kaleke?

Jawaban:

Sudah karena masyarakat sudah punya penghasilan dari adanya potensi wisata.

8. Bagaimana kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Karena saling melengkapi kekurangan masing-masing.

9. Bagaimana potensi sumber daya alam di Desa Kaleke dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan?

Jawaban:

Seperti sekarang ini dimanfaatkan dengan dikembangkan.

10. Apa saja indikator keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kesadaran masyarakat.

11. Bagaimana partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dalam mencapai tujuan pengembangan wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Masyarakat sudah ba sediakan fasilitas tambahan sama pemerintah memberikan ruang untuk pengembangan.

12. Bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh setiap pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya punya kerajinan tangan untuk mendukung pengembangan destinasi wisata, kerajinan tangan itu bisa jadi daya tarik untuk orang-orang yang datang.

13. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mendukung kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kerajinan tangaku saya jadikan souvenir untuk orang-orang yang datang kalau mau beli.

14. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pihak cukup untuk mendukung kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kerajinan tangan yang saya bikin kan di jadikan paket wisata, terus kami masih butuh pelatihan sih untuk ba tingkatkan jualannya kami.

15. Sejauh mana BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat terlibat dalam setiap proses kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya terlibat kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata dengan ikut kegiatan waktu itu ada pelatihan kerajinan tangan, sama ba sediakan kerajinan tangan untuk *souvenir*.

16. Bagaimana pembentukan forum komunikasi antar pihak dapat meningkatkan kolaborasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Biasa saya ikut paling di balai desa, bagusnya ada *forum* itu bisa baku bagi pengalaman.

17. Apakah prosedur pelaksanaan kolaborasi sudah jelas dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Prosedur pelaksanaan belum ada, tapi semoga secepatnya dibuat. Karena, kalau jalan sesuai hasil rapat terus kerjasama ini pasti tidak berlanjut.

18. Apakah proses kolaborasi dilakukan secara transparan sehingga semua pihak dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang diambil?

Jawaban:

Panduan pelaksanaan penting sekali di bikin memang, karena kita tidak tau apakah transparan atau bagaimana ini kerjasama karena tidak di tau bagaimana acuannya.

19. Bagaimana kepuasan pemangku kepentingan terhadap pemimpin dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Bionga ini kan belum ta kelola dengan baik, tapi karena pemimpinnya kita orang yang bagus ba pimpin jadi sedikit demi sedikit ada pengembangan dari pengelolaan Bionga.

20. Sejauh mana kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik yang muncul antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Kepala Desa ba selesaikan masalah itu sudah baik, apa lgi kalau di forum pasti ada saja beda pendapat. Tapi harus ada prosedur pelaksanaan supaya bisa lebih tersusun lah konfliknya di atasi.

21. Apakah jumlah kesepakatan yang tercapai mencerminkan keberhasilan pemimpin dalam memfasilitasi keputusan yang diterima bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya rasa jumlah kesepakatan itu tidak ba kasih liat berhasil atau tida pemimpi ini, tapi bagaimana kesepakatan itu disepakati.

22. Seberapa sering pertukaran pendapat terjadi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam proses pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Menurutku masyarakat jarang di ajak, biasa sudah ada kesepakatan dari BUMDes sama Pokdarwis diskusi baru kami di ajak.

23. Pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata membangun kepercayaan satu sama lain untuk mendukung keberhasilan kolaborasi?

Jawaban:

Sarasa mungkin dari pihak desa sudah berusaha karena kan biasa juga diundang rapat masyarakat tiada datang.

24. Sejauh mana setiap pihak berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya rasa belum ada komitmenku karena belum ada prosedur pelaksana jadi saya tidak tau mau ba apa, kalau cuman mau bertanggung jawab ba sediakan produkku itu sudah saya lakukan tapi kalau yang lain saya tida tau.

25. Apakah semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, harapan, serta tantangan yang ada dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Mungkin belum satu paham, apa saya belum tau juga detail kerjasama ini bemana.

26. Sejauh mana kolaborasi yang telah dilakukan menghasilkan kemajuan atau pencapaian yang nyata dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Fasilitasnya sudah bagus, kolamnya juga sudah besar.

Pedoman Wawancara untuk BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat

Untuk Skripsi yang Berjudul

Analisis Kerjasama Ekonomi Antara Bumdes, Pokdarwis Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi

Nama : Ahmad

Jabatan : Masyarakat

PERTANYAAN

1. Bagaimana bentuk kerja sama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Tanahku pas di depan kolam jadi saya pikir saya bikin gazebo sama wc saja, karena waktu bionga masih baru itu belum ada tempat untuk pengunjung. Jadi saya bikin gazebo sama wc untuk sewakan untuk orang yang datang.

2. Bagaimana peran masing-masing pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam program kerja sama ini?

Kalau saya ba kasih sediah gazebo sama wc di tanahku.

3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam menjalankan program tersebut?

Jawaban:

Lewat rapat saja.

4. Apa kelebihan dari kerja sama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata ini?

Jawaban:

Sudah tertata bionga.

5. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan kerja sama ini, baik dari pihak BUMDes, Pokdarwis, maupun masyarakat?

Jawaban:

Belum semua paham tentang potensi wisata.

6. Apakah ada perbedaan dalam persepsi atau harapan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama ini? Bagaimana hal itu mempengaruhi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Ada, karena belum ada prosedurnya kerjasama.

7. Apakah kerjasama ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Kaleke?

Jawaban:

Sudah karena banyak yang terbantu.

8. Bagaimana kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saling menutupi keterbatasan masing-masing.

9. Bagaimana potensi sumber daya alam di Desa Kaleke dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan?

Jawaban:

Dengan ba bikin tempat wisata.

10. Apa saja indikator keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Punya pemahaman yang sama.

11. Bagaimana partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dalam mencapai tujuan pengembangan wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Masyarakat ikut ba sediakan fasilitas sama ba kasih tanahnya.

12. Bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh setiap pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya bikin gazebo sama wc untuk disewakan sama orang-orang yang datang.

13. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mendukung kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya bikin gazebo sama wc untuk disewakan sama orang-orang yang datang.

14. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pihak cukup untuk mendukung kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya belajar dari tempat-tempat wisata yang biasa kaya di tanjung karang atau yg pinggir-pinggir pantai itu biasa ada ba bikin tempat untuk duduk-duduk, jadi saya juga buat itu di Bionga.

15. Sejauh mana BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat terlibat dalam setiap proses kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya terlibat, yah ini ba memanfaatkan tanahku untuk bikin wc sama gazebo untuk di sewa sama orang-orang yang datang.

16. Bagaimana pembentukan forum komunikasi antar pihak dapat meningkatkan kolaborasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Tempatnya paling di balai desa, apa kalau di gedung serbaguna tidak banyak yang datang. Apa gedung serbaguna jauh juga dari rumahnya masyarakat.

17. Apakah prosedur pelaksanaan kolaborasi sudah jelas dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Belum ada kalau prosedur begitu, itu bikin masyarakat bingung. Apa tidak tau fungsinya jadi apa di kerjasama.

18. Apakah proses kolaborasi dilakukan secara transparan sehingga semua pihak dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang diambil?

Jawaban:

Belum transparan, apa saya belum terlalu mengerti bagaimana saya mau bekerjasama.

19. Bagaimana kepuasan pemangku kepentingan terhadap pemimpin dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Pemimpinnya kita sudah bagus sekali, apa lagi diskusi beliau terbuka sekali sama masyarakat.

20. Sejauh mana kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik yang muncul antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Kepala Desa pasti ba dengar pendapatnya semua orang, baru dia ba jelaskan. Jadi bisa di atasi sedikit kalau ada yang beda pendapat.

21. Apakah jumlah kesepakatan yang tercapai mencerminkan keberhasilan pemimpin dalam memfasilitasi keputusan yang diterima bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Tidak penting itu jumlahnya, tapi yang penting itu berjalan atau tidak itu kesepakatan

22. Seberapa sering pertukaran pendapat terjadi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam proses pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Menurutku masyarakat jarang di ajak, biasa sudah ada kesepakatan dari BUMDes sama Pokdarwis diskusi baru kami di ajak.

23. Pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata membangun kepercayaan satu sama lain untuk mendukung keberhasilan kolaborasi?

Jawaban:

Saya percaya-percaya saja sama BUMDes, saya cuman ikut saja.

24. Sejauh mana setiap pihak berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya sudah tanggungjawab sama gazebo dengan wc yang saya bikin. Pasti saya jaga biar tarawat.

25. Apakah semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, harapan, serta tantangan yang ada dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Saya masih belum tau sekali tentang kerjasama ini sebenarnya.

26. Sejauh mana kolaborasi yang telah dilakukan menghasilkan kemajuan atau pencapaian yang nyata dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Sudah banyak penjual sama tempat istirahat orang datang.

Pedoman Wawancara untuk BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat

Untuk Skripsi yang Berjudul

Analisis Kerjasama Ekonomi Antara Bumdes, Pokdarwis Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi

Nama : Irma

Jabatan : Masyarakat

PERTANYAAN

1. Bagaimana bentuk kerja sama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya ba jual makanan, ada mie, binte, jagung, minuman juga ada. Supaya pengunjung tidak usah jauh beli makanan sudah ada di bionga. Terus, pas ada bionga saya sudah punya uang sendiri bisa ba bantu untuk uang sekolahnya anakku sama uang untuk dapur

2. Bagaimana peran masing-masing pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam program kerja sama ini?

Jawaban:

Ba sediakan tempat makan.

3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam menjalankan program tersebut?

Jawaban:

Biasa di rapat.

4. Apa kelebihan dari kerja sama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata ini?

Jawaban:

Jadi lebih banyak fasilitas di bionga.

5. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan kerja sama ini, baik dari pihak BUMDes, Pokdarwis, maupun masyarakat?

Jawaban:

Masyarakat belum mengerti semua tentang kerjasama.

6. Apakah ada perbedaan dalam persepsi atau harapan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama ini? Bagaimana hal itu mempengaruhi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Ada perbedaan karena belum ada peraturan atau prosedur tentang kerjasama

7. Apakah kerjasama ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Kaleke?

Jawaban:

Iya sudah karena saya sudah punya pendapatan.

8. Bagaimana kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Dengan saling melengkapi, kaya saya ba kasih tanahku.

9. Bagaimana potensi sumber daya alam di Desa Kaleke dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan?

Jawaban:

Dengan ba sedikan fasilitas sama ba kasih menarik bionga.

10. Apa saja indikator keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Adanya dukungan dari pemerintah.

11. Bagaimana partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dalam mencapai tujuan pengembangan wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Masyarakat ikut dalam kerjasama dan pemerintah ba sediakan ruang itu.

12. Bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh setiap pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya ba manfaatkan tanahku untuk tempat jual, sama parkir. Tapi yang ba jual disini bukan saya sendiri tapi banyak, tapi orang-orang disini sendiri.

13. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mendukung kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya buka warung makan, saya jual nasi kuning, minuman sama gorengan.

14. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pihak cukup untuk mendukung kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kalau saya ba sediakan makanan itu ba liat apa yang laku jadi itu terus saya jual, saya liat orang datang itu suka apa itu yang saya pertahankan ada terus saya jual.

15. Sejauh mana BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat terlibat dalam setiap proses kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya cuman ba jual makanan saja, supaya te jauh-jauh orang mo ba cari makanan.

16. Bagaimana pembentukan forum komunikasi antar pihak dapat meningkatkan kolaborasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Tidak ada grub WA, paling kalau mau rapat di kasih undangan.

17. Apakah prosedur pelaksanaan kolaborasi sudah jelas dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kerjasama ini ada cuman karena dari hasil rapat, belum ada prosedur yang ba atur.

18. Apakah proses kolaborasi dilakukan secara transparan sehingga semua pihak dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang diambil?

Jawaban:

Tidak tau juga, apa peraturan-peraturan kerjasama juga belum ada jadi saya tidak tau juga sudah transparan atau belum.

19. Bagaimana kepuasan pemangku kepentingan terhadap pemimpin dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kalau saya puas sekali, kepala desa peduli sekali sama Bionga jadi ada dampaknya dengan kami. Rame terus orang datang jadi kami juga punya banyak pembeli.

20. Sejauh mana kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik yang muncul antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Tiap rapat pasti beda pendapat, Kepala Desa biasa ba kasih penjelasan sama jadi penengah.

21. Apakah jumlah kesepakatan yang tercapai mencerminkan keberhasilan pemimpin dalam memfasilitasi keputusan yang diterima bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Tidak tau juga, tapi kalau hasil kesepakatan itu tidak semua juga di jalankan.

22. Seberapa sering pertukaran pendapat terjadi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam proses pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Tiada saya diajak diskusi.

23. Pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata membangun kepercayaan satu sama lain untuk mendukung keberhasilan kolaborasi?

Jawaban:

Mungkin karena kami belum tau jalannya kerjasama ini jadi kami belum percaya sekali.

24. Sejauh mana setiap pihak berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya belum terlalu tau kerjasama ini karena tidak ada petunjuknya paling cuman rapat begitu saja.

25. Apakah semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, harapan, serta tantangan yang ada dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Saya harap Bionga tetap rame supaya tetap ada pendapatannya kami ba jual disini.

26. Sejauh mana kolaborasi yang telah dilakukan menghasilkan kemajuan atau pencapaian yang nyata dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

kami sudah punya pendapatan dari ba jual.

Pedoman Wawancara untuk BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat

Untuk Skripsi yang Berjudul

Analisis Kerjasama Ekonomi Antara Bumdes, Pokdarwis Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi

Nama : Helmi

Jabatan : Masyarakat

PERTANYAAN

1. Bagaimana bentuk kerja sama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya ba sewakan ban sama tikar untuk orang datang, karena biasa orang datang lupa bawa tikar baru gazebo so full jadi saya ba sewakan tikar. Terus kalau mau mandi biasanya ban itu diperlukan apalagi kalau mau santai di atas air.

2. Bagaimana peran masing-masing pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam program kerja sama ini?

Jawaban:

Kalau saya ba sediakan fasilitas tambahan seperti ba sewa ban dan tikar.

3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam menjalankan program tersebut?

Jawaban:

Ba koordinasi itu biasa di rapat.

4. Apa kelebihan dari kerja sama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata ini?

Jawaban:

Biasa jadi lebih teratur jadi saya sudah punya pendapatan sendiri di situ.

5. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan kerja sama ini, baik dari pihak BUMDes, Pokdarwis, maupun masyarakat?

Jawaban:

Kayanya karena belum semua masyarakat berpartisipasi.

6. Apakah ada perbedaan dalam persepsi atau harapan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama ini? Bagaimana hal itu mempengaruhi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Pasti ada perbedaan apalagi belum ada prosedur, tentu ini sangat ba pengaruhi pengembangan.

7. Apakah kerjasama ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Kaleke?

Jawaban:

Sudah ba kasih manfaat pasti, apa lagi untuk saya jadinya punya pendapatan sendiri sudah.

8. Bagaimana kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kalau masyarakat dengan ba sediakan fasilitas tambahan untuk pengembangan destinasi.

9. Bagaimana potensi sumber daya alam di Desa Kaleke dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan?

Jawaban:

Dengan dibesarkan kolam, memperkenalkan tempat wisata.

10. Apa saja indikator keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Partisipasi dari semua pihak.

11. Bagaimana partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dalam mencapai tujuan pengembangan wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Masyarakat masih separuh berpartisipasi tapi sudah sangat bagus, kalau pemerintah sangat mendukung.

12. Bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh setiap pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Setiap ada yang datang biasa lupa bawa tikar untuk duduk-duduk, terus gazebo so full. Jadi saya ba liat itu jadi peluang usaha, makanya saya ba sewakan tikar dan ban.

13. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mendukung kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya ba sewakan ban dengan tikar untuk orang-orang yang datang ke Bionga.

14. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pihak cukup untuk mendukung kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Sarasa kalau pengetahuan itu masih harus di kasih pelatihan lagi, karena kan belum semua masyarakat berpartisipasi ini masih ada yang belum paham jadi kayanya butuh pencerahan.

15. Sejauh mana BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat terlibat dalam setiap proses kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Ba sewakan ban sama tikar sih saya, karena itu yang dibutuhkan orang-orang datang.

16. Bagaimana pembentukan forum komunikasi antar pihak dapat meningkatkan kolaborasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Paling *forum* itu biasanya ada pas rapat di balai desa, kalau untuk komunikasi lewat *online* belum ada.

17. Apakah prosedur pelaksanaan kolaborasi sudah jelas dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Sekarang ini belum ada prosedurnya, semoga secepatnya dibikin supaya kerjasama ini juga terarah tidak hanya dimulut.

18. Apakah proses kolaborasi dilakukan secara transparan sehingga semua pihak dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang diambil?

Jawaban:

Kalau transparansi kerjasama kayanya belum, apa belum ada prosedur pelaksanaan jadi kami tidak tau juga bagaimana sebenarnya. Tapi kalau laporan pendapatan BUMDes dengan Pokdarwis biasanya ba laporkan itu di forum.

19. Bagaimana kepuasan pemangku kepentingan terhadap pemimpin dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Menurutku beliau bagus sekali jadi pemimpin. Karena, beliau itu ramah apa lagi kalau anak muda berpartisipasi sekali dengan potensi-potensi Desa beliau senang sekali. Beliau suka sekali kalau anak muda ikut dalam kerjasama ini.

20. Sejauh mana kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik yang muncul antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Biasa masalah itu dianggap biasa jadi tidak di selesaikan karena sudah berulang-ulang.

21. Apakah jumlah kesepakatan yang tercapai mencerminkan keberhasilan pemimpin dalam memfasilitasi keputusan yang diterima bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Ada juga kesepakatan hanya dari sebagian pihak, jadi tidak bisa diajarkan tolak ukur jumlahnya sama keberhasilan pemimpin.

22. Seberapa sering pertukaran pendapat terjadi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam proses pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Kalau diskusi sama masyarakat sarasa masih kurang.

23. Pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata membangun kepercayaan satu sama lain untuk mendukung keberhasilan kolaborasi?

Jawaban:

Mungkin karena banyak hasil rapat itu tidak dari masyarakat makanya masyarakat kurang percaya.

24. Sejauh mana setiap pihak berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Semua orang mungkin punya komitmen masing-masing tapi karena tidak ada prosedur atau peraturan yang di bikin jadi buat semua orang tidak masih ragu.

25. Apakah semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, harapan, serta tantangan yang ada dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Yang saya tau kerjasama ini untuk pengembangan destinasi wisata tapi kalau tentang hal lain saya belum tau karena belum ada di perlihatkan prosedurnya.

26. Sejauh mana kolaborasi yang telah dilakukan menghasilkan kemajuan atau pencapaian yang nyata dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Bionga sudah ta tata dengan bagus kolam sudah besar, sudah banyak gazebo sama penjual ada wc jadinya sudah bagus.

Pedoman Wawancara untuk BUMDes, Pokdarwis dan Masyarakat

Untuk Skripsi yang Berjudul

Analisis Kerjasama Ekonomi Antara Bumdes, Pokdarwis Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi

Nama : Nelam

Jabatan : Masyarakat

PERTANYAAN

1. Bagaimana bentuk kerja sama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya bekerjasama itu agar produkku jadi lebih dikenal, makanya saya mau produkku masuk di salah satu produk wisata. Baru juga kebetulan produkku ini dari bahan-bahan tradisional kaya beras dan kopi, produkku ini *skincare*nya orang tua jaman dulu jadi bisa ba kenalkan *skincare* jaman dulu sama pengunjung yang datang.

2. Bagaimana peran masing-masing pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam program kerja sama ini?

Jawaban:

Saya ikut berperan dalam paket wisata.

3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam menjalankan program tersebut?

Jawaban:

Paling berkoordinasi itu pada saat rapat.

4. Apa kelebihan dari kerja sama ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata ini?

Jawaban:

Kelebihannya jadi lebih tertata dan banyak fasilitas yang tersedia di bionga.

5. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan kerja sama ini, baik dari pihak BUMDes, Pokdarwis, maupun masyarakat?

Jawaban:

Masyarakat belum semua ikut dalam kerjasama.

6. Apakah ada perbedaan dalam persepsi atau harapan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama ini? Bagaimana hal itu mempengaruhi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Tentu ada, apa lagi belum ada prosedur pelaksanaan. Dan itu pasti ba pengaruhi pengembangan.

7. Apakah kerjasama ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Kaleke?

Jawaban:

Manfaatnya sudah banyak, apa lagi bagi masyarakat jadi punya pendapatan sudah.

8. Bagaimana kerjasama antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Dengan memanfaatkan potensi atau kelebihan yang di punya masing-masing pihak.

9. Bagaimana potensi sumber daya alam di Desa Kaleke dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan?

Jawaban:

Dengan menyediakan fasilitas dan produk wisata.

10. Apa saja indikator keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Dukungan semua masyarakat dan pemerintah setempat.

11. Bagaimana partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dalam mencapai tujuan pengembangan wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Karena kalau tidak ada dukungan dari pemerintah dan masyarakat maka kerjasama tidak berjalan dengan baik.

12. Bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh setiap pihak (BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat) dalam kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kalau untuk pengembangan destinasi wisata saya ba perkenalkan produkku sih, karena itu jadi kekuatan yang saya punya.

13. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dapat mendukung kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Produkku saya jadikan paket wisata, jadi saya ba jual produkku sama orang-orang yang datang di Bionga.

14. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pihak cukup untuk mendukung kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kami sudah ba sediakan produk untuk paket wisata, tapi kami butuh pelatihan tentang pemasaran di pariwisata atau berbisnis. Supaya kami juga tau bagaimana bisnis di pariwisata sama kami tau penjualannya produknya kami ini bimana.

15. Sejauh mana BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat terlibat dalam setiap proses kolaborasi untuk pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Saya ba sediakan paket wisata, sama ikut rapat perencanaan biasanya.

16. Bagaimana pembentukan forum komunikasi antar pihak dapat meningkatkan kolaborasi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Forum komunikasi sudah ada dibentuk biasa di balai desa, rapat biasanya di bikin itu satu bulan satu kali.

17. Apakah prosedur pelaksanaan kolaborasi sudah jelas dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kerjasama ini sudah banyak yang terlibat, ada BUMDes, Pokdarwis sama masyarakat. Tapi prosedurnya belum jelas, jadinya semua yang dibikin itu cuman hasil kesepakatan tiap rapat saja.

18. Apakah proses kolaborasi dilakukan secara transparan sehingga semua pihak dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang diambil?

Jawaban:

Di rapatkan biasa ba bahas perencanaan juga, walaupun sudah tukar pendapat tapi tidak bisa di pastikan juga sudah transparan kerjasama ini. Apa prosedur kan belum ada di buat jadi tidak tau transparan atau tida.

19. Bagaimana kepuasan pemangku kepentingan terhadap pemimpin dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Beliau dukung sekali pengembangan destinasi wisata, apalagi sama produk-produk lokal suka sekali itu beliau. Makanya beliau ajak saya ikut supaya produkku masuk paket wisata.

20. Sejauh mana kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik yang muncul antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Cukup baik kalau untuk ba kelola konflik, tapi saya harap ada prosedur pelaksanaan supaya konflik tidak ta ulang itu itu terus saja yang terjadi.

21. Apakah jumlah kesepakatan yang tercapai mencerminkan keberhasilan pemimpin dalam memfasilitasi keputusan yang diterima bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Kesepakatan memang sudah banyak, tapi kalau masalah keberhasilan pemimpin menurutku tergantung dampak yang dikasih dari kesepakatan itu.

22. Seberapa sering pertukaran pendapat terjadi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat dalam proses pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Biasa memang ada rapat, tapi disitu sarasa belum di dengar semua pendapatnya orang. Apa sarasa rapat itu cuman formalitas saja padahal sudah ada rencana yang dibahas tidak dengan masyarakat.

23. Pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata membangun kepercayaan satu sama lain untuk mendukung keberhasilan kolaborasi?

Jawaban:

Terlibat semua dari BUMDes, Pokdarwis sama masyarakat, tapi sarasa cuman BUMDes sama pokdarwis yang dilibatkan.

24. Sejauh mana setiap pihak berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Punya komitem semua sebenarnya, cuman karena tidak ada prosedur yang jelas makanya tidak satu tujuan.

25. Apakah semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, harapan, serta tantangan yang ada dalam proses kolaborasi pengembangan destinasi wisata?

Jawaban:

Saya rasa kalau tentang tujuan sama harapan pasti beda-beda, karena belum ada peraturan atau pedoman kerjasama ini.

26. Sejauh mana kolaborasi yang telah dilakukan menghasilkan kemajuan atau pencapaian yang nyata dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Kaleke?

Jawaban:

Fasilitasnya sudah banyak, apa masyarakat sudah bersemangat terus ba kasih bagus fasilitas apa rame terus yang datang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.uindatokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Anggun Calcio NIM : 215120013
TTL : Kaleke, 14 Desember 2003 Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Ekonomi Syariah Semester : 7 (Tujuh)
Alamat : Desa Kaleke, Kec. Dolo Nomor HP : 085392013534
Barat Kab. Sigi

Judul:

- Judul I
Analisis Kerjasama Ekonomi antara BUMDes, Pokdarwis, dan Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Desa Kaleke Kab. Sigi
- Judul II
Analisis Peluang dan Tantangan BUMDes dan Pokdarwis dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Kaleke Kab Sigi
- Judul III
Pengaruh Kompensasi finansial terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu

Palu, 2 September 2024

Mengetahui,
Penasihat Akademik

Noval M.,M.
NIDN. 2015069002

Mahasiswa,

Anggun Calcio
NIM. 215120013

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan:

Pembimbing I : Hur Fikri, S.E.I. M.E.

Pembimbing II: Ahmad Haekel, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan

Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I. M.E.
NIP. 19860204 201403 1002

Ketua Jurusan

Nursyamsu, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198605072015031002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 1053 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Membaca : Surat saudara : **Anggun Calcio** / NIM **215120013** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **ANALISIS KERJASAMA EKONOMI ANTARA BUMDES, POKDARWIS, DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI DESA KALEKE KAB. SIGI**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :
457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas
Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- PERTAMA : 1. Nurfitriani, S.F.I., M.E. (Pembimbing I)
2. Ahmad Haekal, M.Si. (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan
substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan
metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini,
dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun
Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 2 September 2024

Dekan,



Sagir Muhammad Amin

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 5/2 /Un.24/F.V/PP.00.9/02/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 2 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Desa Kaleke
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Anggun Calcio
NIM : 21.5.12.0013
TTL : Kaleke, 14 Desember 2003
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Kaleke

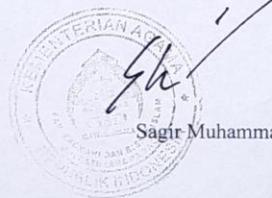
Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: ***"Analisis Kerjasama Ekonomi Antara Bumdes, Pokdarwis Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi"***

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Pemerintah Desa Kaleke

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,



Sagir Muhammad Amin



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KECAMATAN DOLO BARAT
DESA KALEKE**

Jl. Veteran Kode Pos : 94361

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 145/184/SetDes

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kaleke menerangkan bahwa :

Nama : **ANGGUN CALCIO**
No. Stambuk : 21.5.12.0013
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian di Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi pada Tanggal 25 Februari 2025.

Judul Penelitian : ***"Analisis Kerjasama Ekonomi Antara Bumdes, Pokdarwis Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Kaleke Kab. Sigi"***.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kaleke
Pada Tanggal : 25 Februari 2025

KEPALA DESA

MUHAMMAD TAUFAN, S.T



Fasilitas Kolam



Pengunjung Menikmati bermain air dengan menyewa ban



Pengunjung di Permandian Bionga



Pengunjung bersantai dengan menyewa tikar



Akses Menuju Tempat Wisata memiliki jalan yang mulus



Pembelian air bersih

Promosi wisata yang dilakukan
Pokdarwis dan Masyarakat



Media Sosial Instagram



Pamflet Kegiatan



Kegiatan Lomba di Bionga Festival Musik



Kegiatan Jalan Sehat

Pembuatan kerajinan tangan



Kerajinan tangan dari batok kelapa



Kerajinan tangan dari kayu cemara



Proses pembuatan kerajinan tangan



Paket Wisata Nelayan Ayu Skincare

Warung Makan





Ban dan Tikar di Sewakan



Parkiran



Gazebo



WC



Suasana Di antara Gazebo dan WC

Informan



Kepala Desa Kaleke : Bapak Muhammad Taufan S.T



Direktur BUMDes : Bapak Fahmi



Ketua Pokdarwis : Muhammad Syahid



Masyarakat : Gita



Masyarakat : Ibu Fatma



Masyarakat : Ibu Irma



Masyarakat : Bapak Ahmad



Masyarakat : Helmi



Masyarakat : Bapak Zul



Masyarakat : Nelam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Anggun Calcio
TTL : Kaleke, 14 Desember 2003
Nim : 21.5.12.0013
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Kaleke
No. : 0853 9201 3534
Nama Ayah : Abdul Halik
Nama Ibu : Dian Lestari

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD, Tahun Kelulusan : SDN Inti No. 1 Kaleke (2015)
- b. SMP, Tahun Kelulusan : SMP Negeri 2 Sigi (2018)
- c. SMA, Tahun Kelulusan : MAN 1 Kota Palu (2021)